

ANALISIS PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN MODEL *TRIPLE HELIX*

(STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YOANA RAHMA RISTANTI

NIM 145030107111041



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

*Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan
menuju ke sana. (Theodore Roosevelt)*



TANDA PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Model *Triple Helix* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)

Disusun oleh : Yoana Rahma Ristanti

NIM : 145030107111041

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 7 Mei 2018

Komisi pembimbing,



Dr. rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP

NIP. 19740725 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Juni 2018

Jam : 10.00-11.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Yoana Rahma Ristanti

Judul : Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Model *Triple Helix* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



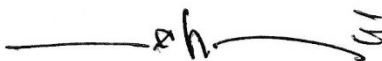
Dr. rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Anggota



Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang diperoleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 7 Mei 2018



Yoana Rahma Ristanti

NIM. 145030107111041

RINGKASAN

Yoana Rahma Ristanti, 2018. **Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Model *Triple Helix* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)**. Dr. rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP.

Pembangunan dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini memiliki peran yang sangat penting. Guna terwujudnya proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal sebanyak 10% dari luas wilayah kota diperlukan kerjasama yang baik antar *stakeholder* yakni pemerintah, swasta, dan kaum intelektual yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan dengan adanya fasilitas yang memadai. Pemerintah tidak dapat berperan dengan tunggal oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktor non pemerintah untuk bekerjasama.

Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yakni kerjasama antar *stakeholder*, inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau, juga faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terjalannya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Ruang terbuka Hijau di Kota Blitar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini mengenai identifikasi aktor (intelektual, bisnis, pemerintah) dalam pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan perspektif *Triple Helix* serta faktor pendukung dan penghambat. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis Creswell.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pengambil keputusan, aktor swasta sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai partisipator. Kerjasama antar aktor tersebut di mulai dari perencanaan hingga pembangunan RTH. Adapun eksistensi aktor non pemerintah dapat juga dilibatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kata Kunci : *Stakeholders*, Ruang Terbuka Hijau, *triple helix*, *Good Governance*

SUMMARY

Yoana Rahma Ristanti, 2018. **Analysis of Green open Space Development based on *Triple Helix* Model (Study on the Environmental Agency of Blitar City)**. Dr. rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP.

Development in order for the open green space currently has a very important role. In order to materialize the proportion of open green space of at least 30% of the total area of the city which consists of open green space of at least 20% of public and private green open space of at least 10% of the total area of the city required a good cooperation between stakeholders, the Government, private, and intellectuals who are expected to meet the needs of the community so as to provide customer satisfaction by having adequate facilities. The Government cannot play a role with single therefore required the involvement of governmental actors to cooperate.

In this study there are three problem of study, i.e. cooperation among stakeholders, Government innovation Blitar in the development of open green space, as well as any factors that support and hinder the establishment of cooperation among the stakeholders in the development of open green space in Blitar City.

This research uses qualitative research methods with the descriptive approach. Research location is in the environmental of Blitar City. Engineering data collection done by observation, interview and documentation. The focus of this study concerning the identification of actors (Government, business, and intellectual) in the development of open green space based on the perspective of the Triple Helix and supporters and an inhibitor factor. Data analysis model used was the model analysis of Creswell.

In this research it is known that the Government Department of the environment acts as a decision-maker, facilitator of private actors and the public as participants. Cooperation between these actors are ranging from planning to development of open green space. For the existence of non-governmental actors can also be involved in the development.

Key Words: *Stakeholders, Open green space, triple helix, Good Governance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Model *Triple Helix* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Fadillah Amin, Dr., m.ap., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi publik.
4. Bapak Dr. rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Pande Ketut Suryadi, SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar.
7. Bapak Ir. Supto Triyono selaku Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
8. Kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Serta teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukannya.

Malang, 7 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan.....	20
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	20
B. Teori <i>Triple Helix</i>	21
1. Konsep <i>Triple Helix</i>	21
2. Ruang Interaksi Antar Aktor Utama Dalam Teori <i>Triple Helix</i>	24
3. Peran Aktor <i>Tripel Helix</i> Dalam Proses Pembangunan.....	26
C. <i>Good Governance</i>	30
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	30
2. Aktor-aktor <i>Good Governance</i>	33
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	34
D. <i>Stakeholders</i>	35
1. Pengertian <i>Stakeholders</i>	35
2. Jenis <i>Stakeholders</i>	38
E. Kerjasama.....	38
1. Pengertian Kerjasama.....	38
2. Bentuk Kerjasama.....	42
F. Ruang Terbuka Hikau (RTH).....	43

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	43
2. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	43
3. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau.....	44
4. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Analisis Data.....	56
H. Uji Keabsahan Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Kota Blitar.....	63
2. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....	64
3. Struktur Organisasi.....	65
B. Hasil Penelitian.....	66
1. Identifikasi Aktor Sebagai Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan RTH Berdasarkan Perspektif <i>Triple Helix</i>	66
a. Kerjasama Antar Aktor Dalam Pengembangan RTH Berdasarkan Perspektif <i>Triple Helix</i>	66
a) Kerjasama Pemerintah dengan Lembaga Pendidikan atau Akademisi.....	66
b) Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat.....	71
c) Kerjasama Pemerintah dengan Instansi Pemerintah yang Lain.....	78
b. Peran Aktor Dalam Pengembangan RTH.....	99
a) Peran Pihak Swasta dalam Pengembangan RTH.....	99
b) Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan RTH.....	109
c) Peran Pemerintah dalam Pengembangan RTH.....	115
c. Inovasi Pemerintah Kota Blitar dalam Pengembangan RTH.....	132
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan RTH.....	141
a. Faktor pendukung dalam Pengelolaan RTH.....	141
b. Faktor penghambat dalam Pengelolaan RTH.....	150
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	155
1. Identifikasi Aktor Sebagai Pemangku Kepentingan Dalam	

Pengembangan RTH Berdasarkan Model <i>Triple Helix</i>	155
a. Kerjasama Antar Aktor Dalam Pengembangan RTH.....	155
a) Kerjasama Pemerintah dengan Lembaga Pendidikan atau Akademisi.....	155
b) Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat.....	157
c) Kerjasama Pemerintah dengan Instansi Pemerintah yang Lain.....	158
b. Peran Aktor Dalam Pengembangan RTH.....	163
a) Peran Pihak Swasta dalam Pengembangan RTH.....	163
b) Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan RTH.....	164
c) Peran Pemerintah dalam Pengembangan RTH.....	165
c. Inovasi Pemerintah Kota Blitar dalam Pengembangan RTH.....	170
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan RTH.....	172
a. Faktor pendukung dalam Pengembangan RTH.....	172
b. Faktor penghambat dalam Pengelolaan RTH.....	174

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	178

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLH.....		65
Gambar 4.2 RTH Taman Pecut.....		129
Gambar 4.3 Pembangunan sumur resapan.....		138
Gambar 4.4 Hutan Kota Kebon Rojo.....		138
Gambar 4.5 Instalasi Solar cell.....		139



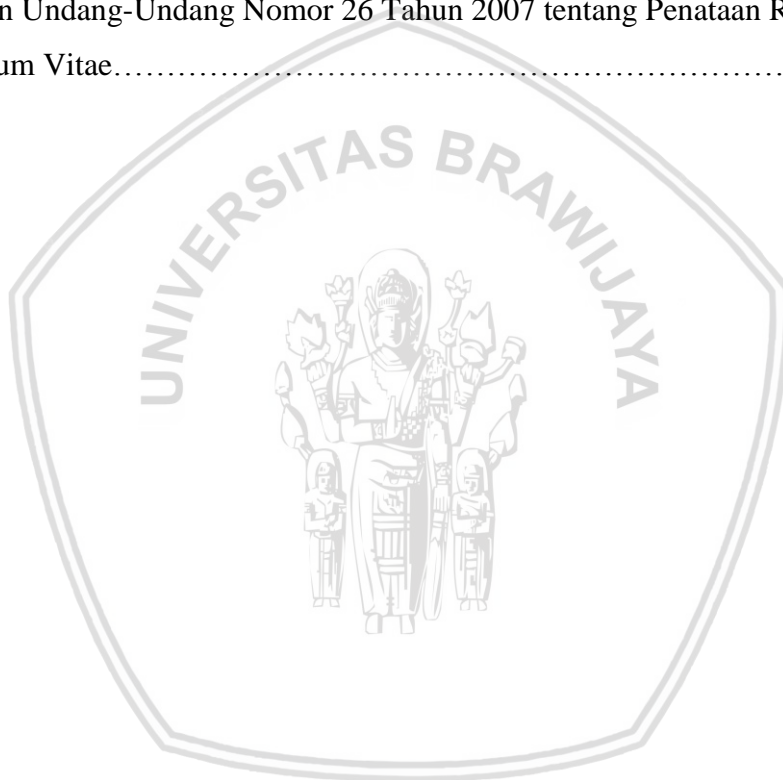
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator <i>Triple Helix</i>	24
Tabel 4.1 Peraturan-peraturan daerah bidang lingkungan Kota Blitar.....	80
Tabel 4.2 Data sumber timbunan sampah Kota Blitar	140



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLH.....	175
Gambar 4.2 RTH Taman Pecut.....	175
Gambar 4.3 Pembangunan sumur resapan.....	176
Gambar 4.4 Hutan Kota Kebon Rojo.....	176
Gambar 4.5 Instalasi Solar cell.....	177
Dokumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang..	178
Curriculum Vitae.....	180



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah yang semakin meluas di Indonesia memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap kondisi lingkungan. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola daerah masing-masing sesuai potensi yang dimilikinya serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dari masyarakat dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Otonomi daerah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk bersaing menyejahterakan masyarakatnya dengan cara meningkatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Otonomi daerah memungkinkan setiap kota atau kabupaten dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing (Septiono, 2016).

Otonomi daerah juga membawa pengaruh terhadap pembangunan. Pembangunan sebuah kota memiliki tantangan tersendiri salah satunya berkaitan dengan pengaturan tata ruang wilayah kota. Pertumbuhan penduduk pada suatu kota serta bertambahnya kebutuhan terhadap lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Alih fungsi lahan dalam

arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan proses pembangunan, sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan jika tidak dapat diatasi maka akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks di kawasan perkotaan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak karena perubahan penggunaan lahan adalah berkurangnya lahan pertanian serta berubahnya orientasi penduduk yang semula bidang pertanian menjadi non pertanian. Lebih lanjut, Susilo (2006) menjelaskan bahwa terjadinya deforestasi adalah salah satu bentuk nyata yang mengakibatkan terjadinya degradasi atau kerusakan lingkungan.

Secara umum permasalahan perkotaan dapat dibagi dalam berbagai kelompok permasalahan yakni :

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (*urban setting*) kurang memadai, antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak berencana, sikap hidup pendatang baru yang masih asing dengan tata kehidupan kota, penataan lahan yang tidak efisien, kebutuhan perumahan terus meningkat.
2. Perencanaan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya menghadapi berbagai kelemahan. Disadari bahwa menyusun rencana pembangunan kota yang berkelanjutan adalah tidak mudah, hal ini disebabkan kehidupan masyarakat perkotaan berkembang semakin cepat, selain daripada itu sifat masalah yang timbul memang kompleks, sedangkan kemampuan aparat pengelolaan kita masih lemah.

3. Sarana dan prasarana perkotaan masih relatif terbatas, disamping itu sarana penunjang yang tersedia seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya, misal keahlian dan keterampilan diperguruan tinggi, data dan informasi, pengalaman-pengalaman, potensi sumber pembiayaan dan lain sebagainya.
4. Partisipasi masyarakat (*social partisipation*) dari lapisan atas sampai lapisan bawah dikembangkan secara luas dan masih belum optimal.
5. Norma-norma tata tertib pergaulan sosial, tertib hukum dan tertib kemasyarakatan ternyata sering kurang efektif disebabkan antara lain karena kondisi sosial ekonomi yang rendah dari berbagai penghuni kota dan terdapat pihak-pihak yang sengaja mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga mengganggu tata kehidupan masyarakat kota.

Permasalahan perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

Berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional, maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.

Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah, dan nyaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang, menjalankan peranannya dan mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk mencapai tujuan penataan ruang khususnya terkait kepentingan publik yakni RTH.

Penyelenggaraan tata ruang suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terkait dengan kepatuhan zonasi dianggap penting karena menjadi penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu. Kepatuhan suatu daerah terhadap ketentuan zonasi yang termuat dalam peraturan daerah setempat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, yang merujuk pada peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Ini menjadi isu penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang, dimana setiap kawasan perkotaan seharusnya menyediakan RTH sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayahnya (Lusetyowati, 2011).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan menyatakan bahwa penyediaan atau pengadaan tanah untuk keperluan Ruang Terbuka Hijau Kota dilaksanakan melalui tata cara penguasaan tanah baik perseorangan maupun Badan Hukum yang tanahnya dalam keadaan terlantar dan atau digunakan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, juga menuntut peran serta swasta dan masyarakat. Peran partai politik (DPRD) menduduki posisi strategis dalam pengembangan visi lingkungan karena mitra kerja dalam pembahasan anggaran (APBD). Sebaik apa pun visi lingkungan Kepala Daerah, tidak akan tercapai tanpa dukungan penganggaran bersama dalam pembangunan hijau. Dalam Inmendagri tersebut juga mewajibkan Pemerintah Daerah menyediakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) serta mendorong dana dan swadaya untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota. Pengelolaan RTH harus berbasis masyarakat, dengan diikuti secara aktif diharapkan pembangunan lingkungan akan berhasil.

Pada dasarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pembangunan daerah seyogyanya harus memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, berdasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa “penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas; keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa adanya pembangunan diharapkan dapat terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin berkurang.

Menurut Ernawi, Imam S. (2012:20) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Apabila Ruang Terbuka Hijau di perkotaan sedikit dapat menyebabkan berbagai dampak. Menurut Erwani, (2007) kurangnya Ruang Terbuka Hijau dapat menyebabkan kenaikan suhu udara perkotaan karena polusi meningkat dan tidak maksimalnya peresapan air ke dalam tanah sehingga dapat memicu bencana banjir.

Ruang terbuka hijau pada hakekatnya sangat bermanfaat secara fungsional (ekologis, sosial budaya, ekonomi) dan estetika. Penyediaan kebutuhan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari rencana struktur pelayanan kegiatan kota dan rencana pemanfaatan ruang kota serta bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka hijau kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Untuk itu penataan atau penyediaan ruang terbuka hijau tidak terlepas dari upaya penataan ruang kota secara keseluruhan, maka penyediaan ruang bagi kebutuhan ruang terbuka hijau tetap harus mengacu pada ketentuan penataan ruang kota yang ada (Sjamsu, 2017).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan minimal mencapai 30% dari luas wilayah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan jenis RTHKP meliputi:

1. Tama kota;
2. Taman wisata alam;
3. Taman rekreasi;
4. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
6. Taman hutan raya;
7. Hutan kota;
8. Hutan lindung;
9. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
10. Cagar alam;
11. Kebun raya;
12. Kebun binatang;
13. Pemakaman umum;
14. Lapangan olah raga;
15. Lapangan upacara;
16. Parkir terbuka;

17. Lahan pertanian perkotaan;
18. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
19. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
21. Kawasan dan jalur hijau;
22. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
23. Taman atap (*roof garden*).

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (31) disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang dibentuk memanjang atau bulat, yang penggunaannya bersifat terbuka sebagai tempat tumbuhnya tanaman baik secara alami maupun sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota. Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Fungsi dari keberadaan ruang terbuka hijau antara lain adalah sebagai penyeimbang ekosistem ekologis, yaitu dimana ruang terbuka hijau tersebut menjadi tempat tinggal para binatang liar seperti burung. Sebagai fungsi arsitektural yaitu menambah keindahan dimana ruang terbuka hijau juga memberikan rasa yang berbeda melalui penataan bentuk warna dan jenis vegetasi ruang terbuka hijau, sebagai fungsi sosial yaitu tempat berinteraksi masyarakat sekitar dimana ruang terbuka hijau tersebut memberikan kesejukan, kenyamanan sehingga masyarakat terwadahi dalam melakukan

interaksi berbagai kegiatan, sebagai pencegah bencana seperti erosi tanah yang di timbulkan baik dari udara maupun pengikisan air, akar tanaman berfungsi untuk mengikat tanah agar kuat dari serangan air (Zoeraini dalam Bagas, 2013).

Salah satu upaya pemerintah guna mengembalikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dengan pembentukan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2011. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya bertujuan untuk menstimulasi terwujudnya kota yang ramah lingkungan, mampu memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan mineral, mengurangi limbah, menerapkan transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sjamsu, 2017).

Penerapan program tersebut mengantarkan pada semakin meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan selama periode tahun 2011-2016 jumlah Ruang Terbuka Hijau di Indonesia bertambah hingga 247 buah dengan luas total 249,2 hektar, yang diantaranya berupa taman kota maupun kebun raya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2016 telah diikuti oleh 165 kabupaten/kota (Kompas.com, 2017).

Suksesnya program tersebut tidak terlepas dari kerjasama actor (*stakeholders*). *Stakeholders* ialah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas

ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Menurut Isa dan Busyra (2008:73) *stakeholders* sudah sangat populer dan telah digunakan oleh banyak pihak dalam hubungannya dengan berbagai disiplin ilmu, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, hukum dan lain sebagainya. Lembaga publik juga telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusannya. Secara sederhana *stakeholders* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dan atau rencana tertentu.

Kerjasama antar aktor (*stakeholders*) sangat diperlukan mengingat bahwa suatu pembangunan memerlukan suatu sistem kesatuan yang nantinya dapat membuat masyarakat mandiri dan sejahtera. Menurut Abdulsyani (1994:156) kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Sementara Tangkilisan (2005:86) menjelaskan kerjasama adalah semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi.

Kerjasama pada hakekatnya ialah mengindikasikan adanya dua orang atau lebih untuk melakukan interaksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Pamudji, 1985:12-13). Hal ini menjelaskan dalam kerjasama terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu: unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Apabila salah satu

unsur tersebut tidak termasuk dalam obyek yang dikaji maka dianggap tidak terdapat kerjasama.

Dalam mewujudkan pembangunan RTH yang sukses maka dibutuhkan kerjasama dengan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memerlukan bantuan berupa tambahan berupa investasi dari pihak swasta dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan kota. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini mengingat adanya keterbatasan yang dimilikinya baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan sumber daya lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat sebagai penikmat ruang terbuka hijau.

Peran pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan ketersediaan RTH. Peran pemerintah dibutuhkan dalam membuat kebijakan terkait ketersediaan RTH. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menambah ketersediaan RTH di Kota Blitar. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mencukupi apabila mengelola dan mengembangkan seluruh ruang terbuka hijau yang ada. Selain itu, keterbatasan

sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah kota seharusnya memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

Kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh pihak masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Swasta membantu pemerintah dalam penyediaan lahan dan anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau sedangkan masyarakat dapat berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau. Dengan demikian seharusnya pemerintah Kota memberikan lowongan kepada masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Suryawati (2017) tentang sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa sinergitas yang baik diantara *stakeholders* dalam pengelolaan RTH taman kota. Keempat indikator yakni komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas telah terpenuhi kedua tahap. Kerjasama dalam pemeliharaan taman yaitu menjaga kebersihan taman dan pengelolaan sampah, lalu kerjasama dalam pengamanan taman yakni pengamanan dari PKL dan oknum tidak bertanggungjawab. Seluruh

stakeholders telah bersinergi dengan baik guna meningkatkan pengelolaan taman di wilayah perkotaan, khususnya di tahap pemeliharaan dan pengamanan.

Selain itu juga, perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan RTH. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH) akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berwujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka setiap *stakeholders* yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan kota, harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan RTH yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan ketersediaan RTH, sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergiat di dalamnya. Peran serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan perencanaan RTH.

Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subjek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing, sehingga pada saatnya produk RTH yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari keterlibatannya dalam proses perencanaan RTH. Harus pula disadari, bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam melakukan perencanaan RTH harus dilihat dalam skala dan kedudukan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau dari keseluruhan arah dan bentuk penyediaan ruang terbuka yang harus direncanakan pada suatu kota.

Dalam dekade terakhir, kerjasama antar *stakeholders* dalam interaksi dan kolaborasi dikenal dengan konsep *tripel helix*. Etzkowitz (2007:56) menjelaskan konsep *tripel helix* sebagai metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya penciptaan sinergi tiga kutub yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah yang berdiri sejajar dan saling bergantung dan saling berperan satu sama lain. Dalam teori *governance* yang merujuk kepada proses penyelenggaraan suatu pemerintahan di suatu Negara dengan melibatkan *stakeholders* yang ada, baik pemerintah, swasta, masyarakat madani (*civil society*) (Rewansyah, 2010:80).

Kota Blitar mempunyai luas yang hanya 32,58 km², terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10,50 km² dan Kecamatan

Sukorejo 9,93 km². Saat ini kota Blitar memiliki luas RTH seluas 27.681 ha (<http://bappeda.jatimprov.go.id>).

Kota Blitar adalah salah satu kota yang sampai kini kebutuhan Ruang Terbuka Hijau masih terbilang kurang. Ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Blitar baru mencapai 10,68% yang terdiri dari beberapa lokasi diantaranya di Taman Sentul, Taman Rekreasi Keluarga Kebonrojo, Blitar Green Park, dan Taman Pecut (DLH Kota Blitar, 2017). Dalam rangka memenuhi kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Blitar, pemerintah kota akan mulai mengembangkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2018 ini. Bentuk pengembangan tersebut dengan membongkar beberapa eks kantor kelurahan yang sudah tidak layak untuk digunakan, karena lokasi yang tidak strategis sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa kantor kelurahan yang rencananya akan di bongkar yaitu eks kantor kelurahan Pakunden, eks kantor kelurahan Rembang dan eks Pasar Pahing.

Padahal, daerah perkotaan merupakan pusat aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi pemerintahan, politik, dan pendidikan serta sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau saat ini memiliki peran yang sangat penting. Guna terwujudnya pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Blitar diperlukan kerjasama yang baik antar aktor yakni pemerintah, swasta, kaum intelektual yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diharapkan bisa memberikan kepuasan dengan adanya fasilitas yang memadai.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penelitian mengambil judul **“Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Model *Triple Helix* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Model *Triple Helix*?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan menganalisis pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan model *Triple Helix*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman yang dianggap tepat mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan model *Triple Helix*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan perspektif *Triple Helix*.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat sebagai landasan atau acuan dalam membahas dan menganalisa permasalahan yang diangkat. Teori-teori tersebut meliputi: administrasi pembangunan, *triple helix*, *good governance*, *stakeholders*, kerjasama, dan ruang terbuka hijau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menentukan fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data, serta uji keabsahan data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Tjokromidjoyo (1985:12) mengatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Menurut Suharto (2008:1-2) hakekat dari pembangunan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang mana tujuan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan pembangunan selalu menghasilkan suatu perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu mengenai usaha yang dilakukan oleh suatu Negara

untuk dapat berkembang kearah yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas bangsa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Teori *Triple Helix*

1. Konsep *Triple helix*

Teori mengenai *Triple Helix* pada awalnya dipopulerkan oleh Etzkowitz (2007:56) sebagai metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya penciptaan sinergi tiga kutub yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan. Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu pengetahuan berujung pada inovasi yang memiliki potensi ekonomi atau kapitalisasi ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) (Etzkowitz: 2005).

Model pembangunan *triple helix* terdiri dari tiga elemen dasar, yakni pertama peran yang lebih banyak bagi perguruan tinggi untuk melakukan suatu proses inovasi, kedua adanya perubahan hubungan yang kolaboratif di antara ketiga institusi di mana dengan adanya inovasi kebijakan akan semakin meningkatkan hasil interaksi antar universitas-industri-pemerintah, ketiga sebagai tambahan fungsi mereka terdahulu maka setiap bagian 'ambil peran dari yang lain'. Model pembangunan *triple helix* melihat bahwa perguruan tinggi sebagai suatu sumber elemen penting untuk melakukan rekombinasi dan inovasi. Hal itu berarti terdapat *reinforcement* aturan dalam sebuah perguruan tinggi yakni dari ilmu-ilmu dasar ke proses inovasi dan produksi

yang merupakan awal dari sikap *entrepereuener* sebuah perguruan tinggi (Etzkowitz: 2005).

Teori *triple helix* merupakan model penemuan spiral yang menangkap hubungan-hubungan yang saling menguntungkan pada kondisi yang berbeda dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dimensi pertama model *triple helix* adalah transformasi internal di setiap *helix* seperti pembangunan hubungan lateral di antara perusahaan aliansi yang strategis atau suatu asumsi misi pembangunan ekonomi oleh universitas. Kedua pengaruh satu *helix* terhadap yang lain, misalnya, peran pemerintah federal dalam menerapkan kebijakan industri di Dermaga Dole tahun 1980. Ketika peraturan yang menyangkut properti intelektual yang dihasilkan pemerintah melalui penelitian berubah, maka teknologi mengalihkan kegiatan sebagai wilayah yang dimiliki perguruan tinggi, sehingga menghasilkan suatu transfer profesi akademik yang menyangkut teknologi. Dimensi ketiga adalah kreasi jejaring dan organisasi tiga hubungan yang baru dari interaksi antara *tiga helix* yang dibuat untuk memunculkan gagasan-gagasan dan format baru dalam pembangunan berteknologi tinggi (Etzkowitz, 2005).

Etzkowitz menggambarkan bahwa *triple helix* menunjukkan hubungan antara universitas-industri-pemerintah sebagai suatu variable yang berdiri sejajar dan saling bergantung dan saling berperan satu sama lain. Disini terjadi gerakan institusional yang terpisah yang menunjukkan paling tidak adanya suatu ideologi, seperti yang terjadi di Amerika. Ada juga model pergantian yang dianut suatu negara yang meliputi industri dan akademian

seperti terjadi di Uni-Soviet, tetapi kondisi ini pun dapat ditemukan di Amerika latin dan negara-negara Eropa.

Hubungan bilateral antara pemerintah - perguruan tinggi, universitas - industri juga industri dan pemerintah telah berkembang menjadi hubungan tripatri di antara ke 3 institusi tersebut, terutama di level regional. Hubungan Universitas, industri dan pemerintah muncul bermula dari institusi yang berbeda di berbagai bagian dunia, tetapi untuk tujuan yang umum adalah merangsang pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pembangunan ekonomi (Etkowitz, 2007).

Model *triple helix*, penekanan dikonsentrasikan pada interaksi, hubungan-hubungan antar lembaga dan kolaborasi. Jika secara tradisional lembaga pemerintahan, pendidikan tinggi dan bisnis masing-masing beroperasi dalam ranah-ranah yang saling terpisah satu dari yang lainnya maka model *triple helix* menegaskan pentingnya hubungan-hubungan yang berjejaring. Fokus perhatian dalam model *triple helix* adalah pada permasalahan bagaimana ketiga arena kelembagaan yang berbeda- arena akademik, bisnis dan pemerintah- dapat melakukan interaksi dan pertukaran sumber-sumber pengetahuan (Yuliar, 2014). Menurut Etkowitz seperti yang dikutip dalam makalah tersebut konsep *triple helix* berperan sebagai pemandu dalam pengelolaan interaksi. Dalam masyarakat yang berbeda proses transisi dapat dimulai dari titik-titik berangkat yang berbeda-beda (Etkowitz, 2007).

Dekade terakhir ini, kebijakan pendidikan tinggi di berbagai negara memberi penekanan pada hubungan '*triple helix*' di antara *academicians*,

businessmen/women, dan *government agencies* (ABG). Gagasan dasar yang melatari pengembangan kerangka kerja ABG adalah bahwa agar pengetahuan dapat menghasilkan nilai (*values*), proses pencapaian pengetahuan tidak boleh terisolasi dari lingkungannya. *Values* merupakan hasil dari interaksi sosial. Konsep ABG ini berkaitan erat dengan konsep sistem inovasi.

Triple Helix merupakan kolaborasi dari tiga sektor yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah yang berperan mendorong tumbuhnya inovasi. Pengembangan RTH di suatu tempat dibutuhkan dukungan kerja antara intelektual, bisnis, dan pemerintah. Ketiga aktor tersebut merupakan penggerak lahirnya ide dan gagasan baru.

Adapun dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Aktor *Triple Helix* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator *Triple Helix*

Dimensi <i>Triple Helix</i>	Indikator <i>Triple Helix</i>	Sumber
Intelektual	Pendampingan	Disperindag dan Etzkowitz, 2008
	Konsep Manajemen	
	Jaringan	
Bisnis	Kerjasama	Oscar, 2010
	Perlindungan	
	Iklim Bisnis	
Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Disperindag dan Etzkowitz, 2008
	Undang-Undang	
	Kebijakan	

2. Ruang Interaksi Antar Aktor Utama Dalam Teori *Triple Helix*

Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk *knowledge spaces*, ruang pengetahuan di mana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang setara, yang

akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk membuat *consensus space* (ruang kesepakatan) di mana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan kepada terbentuknya *innovation spaces* (ruang inovasi) yang dapat mempercepat proses pembangunan. Sirkulasi ini selalu berusaha menciptakan kebaruan (inovasi) dan inovasi sering mengubah struktur yang telah ada, atau Destruksi Kreatif (Schumpeter, 1994) yang berarti, munculnya inovasi baru di dalam proses pembangunan. Ruang interaksi yang terjadi antar aktor utama *Triple Helix* dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Ruang Ilmu Pengetahuan (*knowledge spaces*)

Di sini individu-individu dari berbagai disiplin ilmu mulai terkonsentrasi dan berpartisipasi dalam pertukaran informasi, ide-ide dan gagasan-gagasan. Wacana-wacana dan konsepsi tumbuh subur dan senantiasa dimantapkan.

b. Ruang Konsensus (*consensus space*)

Di sini mulai terjadi bentukan-bentukan komitmen yang mengarah pada inisiatif tertentu dan proyek-proyek, pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Diperkuat pula oleh sirkulasi informasi yang kredibel dan netral sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan individu-individu yang bersangkutan hingga menjadi dukungan-dukungan terhadap konsensus.

c. Ruang Inovasi (*innovation spaces*)

Di sini inovasi yang tercipta telah terformalisasi dan bertransformasi menjadi *knowledge capital*, berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, partisipasi dari institusi finansial (misalnya, *Seed Capital*, *Angel Capital*, *Venture Capital*) dan dukungan pemerintah berupa insentif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sebagainya.

3. Peran Aktor *Tripel Helix* Dalam Proses Pembangunan

a. Intelektual (*Intellectuals*)

Intelektual memiliki peran sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pembangunan kota khususnya penataan ruang terbuka hijau. Intelektual sebagai bagian dari komunitas cendekiawan di dalam lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan ide kreatif dan mengembangkan konsep penataan RTH melalui kajian keilmuannya. Kontribusi akademisi tersebut dapat dijabarkan dalam tiga bentuk peranan, seperti juga yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

- 1) peran pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki pemikiran yang maju dan ide kreatif dalam mengemban tugas pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki

azas keadilan, keseimbangan dan peduli pada aspek dan tanggung jawab lingkungan.

- 2) peran penelitian dilakukan untuk memberi masukan tentang model kebijakan penataan ruang terbuka hijau dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kajian keilmuan khususnya dalam perencanaan penatan tata ruang yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan.
- 3) peran pengabdian masyarakat dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung masyarakat yang peduli pada lingkungan dan ekosistem hayati.

Pada saat menjalankan perannya secara aktif, cendekiawan dituntut untuk memiliki semangat disipliner dan eksperimental tinggi, menghargai pendapat yang bersebrangan (empati dan etika), mampu memecahkan masalah secara kreatif, menjalankan observasi yang bersifat lintas sektoral, menggunakan teknologi ICT (*Information and Communication Technologies*) dengan fasih, menjadi anggota forum pengkayaan ilmu pengetahuan dan seni baik secara nasional maupun internasional, formal maupun non- formal.

b. Bisnis (*Business*)

Aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi- teknologi baru, serta juga merupakan bagian dalam pembangunan lingkungan yang dapat berfungsi sebagai penyedia *Corporate Social*

Responsibility (CSR) yang merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan atas operasional usaha yang dilakukan. Aktor bisnis juga perlu mempertimbangkan dan mendukung keberlangsungan pembangunan lingkungan dengan azas berkelanjutan dalam setiap peran yang dilakoninya. hal tersebut dapat dilakukan dengan berperan sebagai penyumbang atau penyelenggara kegiatan CSR.

Peran bisnis dalam penataan ruang terbuka hijau ini adalah:

- 1) Pencipta, yaitu sebagai *center of excellence* hal ini berkaitan dengan kewajiban sebuah perusahaan dalam penyelenggaraan CSR berbasis lingkungan. Dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah perusahaan harus memiliki ide kreatif dalam perencanaan pembangunan RTH.
- 2) Pembentuk Komunitas masyarakat yang peduli lingkungan, yaitu sebagai penggerak yang membentuk ruang public sebagai tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya RTH.

c. Pemerintah (Government)

Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan ruang terbuka hijau sangatlah dibutuhkan terutama melalui pengelolaan otonomi daerah yang baik, penegakan demokrasi, dengan prinsip- prinsip *good governance*. Ketiganya bukan merupakan hal yang baru, memang sudah menjadi agenda utama reformasi. Jika berhasil dengan baik, ketiganya merupakan kondisi positif bagi pembangunan ruang terbuka hijau. Para ahli percaya, kemajuan pembangunan kota dengan standar RTH yang dapat dilakukan dengan baik

karena masing-masing kepala daerah mengenal karakteristik wilayahnya masing-masing.

Sementara prinsip-prinsip *good governance*; partisipasi, penegakan hukum, transparansi, *responsiveness*, *equity* (keadilan), visi strategis, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi (arahan), adalah prinsip-prinsip pengelolaan dimana dapat mendorong tercapainya pemenuhan ruang terbuka hijau semakin luas. Pemerintah haruslah memiliki kepekaan dan apresiasi terhadap aspirasi rakyat. Untuk itu aktor pemerintah harus dapat menempatkan birokrasi secara proporsional, transparan dengan semangat mencapai interaksi yang sejajar sehingga pembangunan kota dapat diimplementasikan dengan baik. Peran utama Pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau adalah:

1. Katalisator, fasilitator dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar pemenuhan ruang terbuka hijau didukung oleh berbagai pihak. Tidak selamanya dukungan itu haruslah berupa bantuan finansial, insentif ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik untuk mewujudkan tata kota yang seimbang;
2. Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan *people*, industri, institusi, intermediasi, sumber daya dan teknologi. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan dan perluasan ruang terbuka hijau jika pemerintah mampu membuat

kebijakan- kebijakan yang progresif dengan cara penyediaan lahan yang tinggi bagi ruang terbuka hijau.

3. *Investor*. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup pemenuhan ruang terbuka hijau dan bertanggungjawab terhadap infrastruktur pembangunannya.
4. *Urban planner*. Peran pemerintah sebagai eksekutif dalam perencanaan jangka panjang tatakelola kota melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat melakukan perencanaan yang bertahap untuk penyediaan dan pembangunan RTH.

C. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Konsep *Good Governance* bukanlah hal baru, keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM-219M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow. Istilah *governance* berasal dari bahasa Yunani “kybernan” dan kybernetes” yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu. Konsep *good governance* pada awalnya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Istilah ini mulai populer ketika badan-badan internasional dalam bidang moneter

mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk dapatnya lembaga-lembaga moneter tersebut memberikan kepada negara pemberi bantuan.

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- c. Pemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) adalah *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sector publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola

pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, UNDP, 1999* dalam Sedarmayanti, 2007: 2).

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetifa, 2003).

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian,

pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Aktor-aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

- a. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatankegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam lapangan dapat dihindari. Negara sebagai salah satu unsure *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sector publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dapat dihindari.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG.

Menurut Mardiasmo (2009:18) terdapat prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Lembaga -lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and effectiveness*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efektif).

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Visi Strategik (*Strategic Vision*)

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan .

D. Stakeholders

1. Pengertian Stakeholders

Pada kajian ilmu administrasi sudah tidak asing dengan istilah *stakeholders*. Menurut Sumarto (2003:3) bahwa *stakeholders* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi perempuan atau laki-laki yang

memiliki suatu kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Pada umumnya *stakeholders* merupakan para pengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham.

Menurut Warsono dkk (2009: 29-31) terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori *stakeholder* yaitu:

a. Argumen Deskriptif

Argumen deskriptif menyatakan bahwa pandangan pemangku kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai bagaimana perusahaan sebenarnya beroperasi atau bekerja. Manajer harus memberikan perhatian penuh pada kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi tugas manajemen lebih penting dari itu. Untuk dapat memperoleh hasil yang konsisten, manajer harus memberikan perhatian pada produksi produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif bagi para pelanggan mereka, menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas tinggi, serta mentaati semua regulasi pemerintah yang cukup kompleks. Secara praktis, manajer mengarahkan

energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik saja.

b. Argumen Instrumental

Argumen instrumental menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan dinilai sebagai suatu strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak dan memberi perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepentingannya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

c. Argumen Normatif

Argumen normatif menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Perusahaan mempunyai penguasaan dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumber daya, dan hak istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang mendapat efek dari tindakan-tindakan perusahaan.

Teori *stakeholder* ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* merupakan individu, sekompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Kelangsungan suatu perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat *stakeholder*, maka usaha suatu perusahaan untuk beradaptasi semakin besar.

2. Jenis *Stakeholders*

Stakeholders dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholders* terhadap suatu permasalahan, yaitu:

a. *Stakeholders* utama (primer)

Stakeholders utama merupakan *stakeholders* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dalam suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan pada penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan menjadi obyek kebijakan atau program, pimpinan instansi pemerintah yang langsung terlibat dalam pengambilan dan implementasi program ataupun perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendanai implementasi program. Contoh *stakeholders* primer antara lain: investor, pemegang saham, dan konsumen.

b. *Stakeholders* pendukung (sekunder)

Stakeholders pendukung adalah *stakeholders* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan maupun program, namun memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap suatu masalah tertentu sehingga mereka ikut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah, tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung. Contoh *stakeholders* pendukung antara lain: lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

c. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci adalah *stakeholders* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksudkan adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Misalnya saja *stakeholders* kunci untuk suatu keputusan program dalam *level* kabupaten yang terdiri dari pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan (Usahid, 2008).

E. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (1994:156) kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Menurut Tangkilisan

(2005:86) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Publik lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Oleh karena itu perlu diadakannya kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Pamudji (1985:12-13) kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian tersebut terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Apabila salah satu unsur tersebut tidak termasuk dalam obyek yang dikaji maka dianggap tidak terdapat kerjasama.

Dari penjelasan menurut para ahli disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok yang bersangkutan, memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Rosen dalam Keban (2007:33) menjelaskan bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) yang dibedakan atas:

- a. *Handshake agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang tidak didasarkan perjanjian tertulis.

- b. *Written agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas penjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Join Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Join Services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Keberhasilan dari kerjasama dibutuhkan prinsip-prinsip umum yang dijelaskan oleh Ealin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) mengenai prinsip umum yang terdapat dalam prinsip *good governance*, yaitu:

- a. Transparansi

- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Konsensus
- g. Saling menguntungkan dan memajukan

2. Bentuk Kerjasama

Soekanto (1990) menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam teori sosiologi yang membedakan empat bentuk kerjasama, yaitu:

- a. Kerjasama Spontan (*spontaneous coopeation*)

Yaitu suatu kerjasama yang terjalin dilakukan serta merta dimana ada ketidak sengajaan.

- b. Kerjasama Langsung (*directed cooperation*)

Yaitu merupakan kerjasama hasil perintah atasan atau penguasa yang setingkat di atasnya.

- c. Kerjasama Kontrak (*constractual cooperation*)

Yaitu kerjasama yang dilakukan atas dasar adanya suatu kesepakatan tertentu.

- d. Kerjasama Tradisional (*traditional cooperation*)

Yaitu kerjasam yang dibentuk karena bersifat tradisi atau adat kebiasaan. Misalnya, kerjasama dalam bentuk gotong royong, tolong menolong, atau solidaritas sosial.

F. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 31 menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu tempat yang berada didalam sebuah kota atau di wilayah tertentu yang luas, areanya bisa memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan didalamnya terdapat tanaman maupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur kota yang sangat penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis. Termasuk halaman rumah/bangunan pribadi dalam hal ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang ditanami berbagai macam tanaman. Ruang terbuka hijau perkotaan merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya dan arsitektur dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota atau wilayah minimal harus mencapai 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

2. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau khususnya mengenai RTH publik di wilayah perkotaan sangatlah penting. Apabila ruang terbuka hijau suatu wilayah kota tidak tersedia maka bencana semakin tinggi karena RTH digunakan untuk mengendalikan arus air, meningkatkan berbagai macam

flora dan fauna, menciptakan nilai estetik lingkungan kota. Selain itu ruang terbuka hijau juga berperan dalam kualitas atmosfer di bumi, penyegaran udara, menurunkan polusi dan suhu kota dan meredam kebisingan kota (Sugandhi, dkk, 2007:105).

Menurut Hakim dkk (2003:98) menjelaskan fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai tempat pelindung berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana menciptakan keseimbangan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik didarat, perairan, maupun diudara.
- e. Sebagai sarana pendidikan maupun pelatihan serta penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai pelindung plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Hakim (2003:99) mengemukakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat estetis keindahan
- b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman. Manfaat penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.
- c. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air apabila turun hujan.

- d. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi yang akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
- e. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
- f. Manfaat ekologis, keserasian lingkungan antara satwa, tanaman, dan manusia sehingga dapat hidup dengan nyaman.
- g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari teriknya sinar matahari.
- h. Manfaat *hygienis*, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.

3. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau

Pada area perkotaan, ruang terbuka biasanya dijadikan sebagai kawasan rekreasi. Walaupun dengan demikian, ruang terbuka ini dikategorikan dalam berbagai macam. Ada ruang yang diperuntukkan untuk anak-anak, muda dan orang dewasa. Klasifikasi lain yang tidak boleh diabaikan adalah konservasi alamiah, baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini bisa dibentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai pengguna lahan atau bisa juga menjadi tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu, atau bisa berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai untuk pembangunan kota yang memuaskan (Gallion,1994:34).

Pembanguna RTH di wilayah kota lebih diutamakan pada unsur penghijauan taman kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau untuk kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau area pertanian, dan kawasan hijau untuk jalur hijau.

Penyediaan RTH berdasarkan pada luas wilayah perkotaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Irianti, 2010:3) adalah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau terdiri atas RTH publik (pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH privat (perseorangan dan intitusi).
- b. Proporsi RTH pada wilayah kota adalah minimal 30% dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat.
- c. Apabila luas RTH publik atau privat di kota bersangkutan memiliki total lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

4. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Hakim dll (2003:105), aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH Kota Blitar dari:

a. Pemerintah

Kewajiban pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku bidang pengelola harus dapat melakukan tugasnya dengan tepat serta mampu memperhitungkan segala hal yang muncul dikemudian hari.

RTH yang harus disediakan oleh pemerintah adalah:

1. RTH koridor, meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan.
2. RTH produktif meliputi kawasan pertanian kota, perairan.
3. RTH konservasi, meliputi kawasan cagar alam, hutan kota.
4. RTH lingkungan meliputi, kawasan taman lingkungan, dan bangunan taman kota.
5. RTH khusus meliputi, kawasan pemakaman, perkantoran, kebun binatang.

b. Swasta

Peran swasta sebagai pelaku ekonomi yang bergerak pada sektor formal maupun informal. Tidak mutlak dalam pelaksanaan pengadaan RTH. RTH yang memungkinkan dapat dikelola oleh pihak swasta, yaitu meliputi:

1. RTH untuk keindahan
2. RTH untuk rekreasi
3. RTH lainnya yang dapat dikomersilkan

c. Masyarakat

Peran serta masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan terhadap pengelolaan RTH lebih terbatas hanya pada pemanfaatan dan pemeliharaan baik dari segi perencanaan maupun pengadaannya.

d. Media massa

Media massa baik media elektronik maupun media cetak juga ikut berperan dalam pengelolaan RTH khususnya untuk menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan RTH di perkotaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki landasan dari filsafat *postpositivism* dengan menggunakan obyek penelitian yang alamiah dengan menggunakan instrumen kunci, dalam mengambil sampel penelitian dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, sedangkan untuk pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data triangulasi, di mana pada analisis yang memiliki sifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih mengutamakan pada makna generalisasi.

Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan bentuk jawaban-jawaban atau kata-kata tertulis dari perilaku orang-orang disekitar yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki prosedur

yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari berbagai sikap orang-orang atau dijadikan sebagai objek penelitian yang dapat diamati, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data secara induktif, dengan pengumpulan datanya lebih banyak berhubungan dengan informan secara langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki secara cermat program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu dan dibatasi oleh waktu serta aktivitas tertentu. Maka dari itu, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2014:33). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai kerjasama antar aktor dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan perspektif *Triple Helix*..

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah (Creswell, 2014: 66). Fokus penelitian merupakan tahapan awal untuk menjelaskan secara umum dalam pelaksanaan penelitian untuk menetapkan masalah yang menjadi pokok penelitian. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan hasil dari penelitian. Selain itu fokus

penelitian juga dapat memudahkan peneliti untuk menentukan data yang diperlukan dari obyek dan situasi yang diteliti.

Pembatasan fokus penelitian sangat penting kaitannya dengan pengambilan data yang diolah dalam analisis penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi aktor sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan model *Triple Helix*:
 - a. Kolaborasi/ kerjasama
 - b. Peran
 - c. Inovasi
2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - a. Faktor Pendukung mencakup faktor internal dan eksternal.
 - b. Faktor penghambat mencakup faktor internal dan eksternal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menggali data atau informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan kerjasama antar aktor dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan perspektif *Triple Helix*. Penetapan lokasi penelitian dianggap penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian itu artinya objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Kota Blitar, karena

pengembangan lingkungan hidup di daerah Kota Blitar masih belum maksimal yang saat ini baru mencapai 10,68% (DLH Kota Blitar, 2017) serta tata ruang wilayah yang masih kurang memperhitungkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kota Blitar memiliki potensi untuk pengembangan RTH, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Blitar mengenai kerjasama antar aktor dalam pengembangan RTH berdasarkan perspektif *Triple Helix*.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada bab satu. Situs penelitian dalam penelitian “Analisis pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan model *Triple Helix*” yaitu, pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang akurat dan sesuai dengan apa yang peneliti kehendaki tentunya akan memperoleh hasil yang baik sehingga data-data tersebut harus digali dari sumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Sumber data utama yang dipakai dalam penelitian kualitatif adalah berupa deskripsi serta tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun macam sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data yang kita peroleh dari orang-orang (narasumber) yang bisa diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan narasumber, dokumen berupa data-data yang bisa

diperoleh dari instansi, dan sumber data yang berasal dari suatu peristiwa yang telah terjadi (Moleong, 2006:157).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data dari sumber data yang sesuai yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan tanpa adanya perantara, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer, yaitu:

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
- b) Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
- c) Pihak Swasta dari Telkomsel dan Bank Jatim
- d) Humas Unisba (Universitas Islam Balitar)
- e) Pengunjung Taman Kota

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi berupa dokumen atau buku ilmiah serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam hal ini data sekunder diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu teknik wawancara yang mendalam, teknik observasi dan teknik studi dokumentasi, untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari tempat dan subjek penelitian, sedangkan menurut Creswell (2014), sumber data yang didapatkan dari penelitian kuantitatif merupakan data yang berupa kata-kata maupun tindakan. Kata-kata yang terdapat dalam sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan pengamatan atau melakukan wawancara untuk melakukan pengambilan data untuk sumber informasi secara langsung. Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Creswell (2014) mengemukakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif penting untuk memperoleh informasi kegiatan, perilaku, objek, peristiwa atau kejadian secara obyektif. Kegiatan observasi peneliti lakukan untuk memberikan dan menyampaikan gambaran penyajian data yang realistis mengenai perilaku manusia dalam melakukan evaluasi yaitu dalam pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dari fokus dan tema penelitian dapat diperoleh dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan sehingga akan didapatkan data yang akurat dan sesuai adanya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non partisipan atau observasi tidak langsung.

Artinya peneliti datang ke tempat yang akan diamati tetapi peneliti tidak ikut dalam kegiatannya.

2. *Interview* (wawancara)

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan subyek terteliti secara langsung dalam memperoleh data dari subyek terteliti yang berhubungan dengan tanggapan dan tindakan yang terkait dengan. Creswell (2014), menyatakan bahwa tujuan utama dari wawancara adalah untuk memungkinkan informan menggambarkan sepenuhnya pengalaman mereka dari fenomena yang diteliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan penelitian guna memperoleh data awal dari penelitian. Selanjutnya guna melengkapi data wawancara tersebut sesuai dengan fokus penelitian, wawancara dilakukan melalui telepon seluler dengan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki informan penelitian. Hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkannya melakukan wawancara langsung dengan setiap informan penelitian mengingat kesibukan setiap informan.

Wawancara nantinya akan dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Konservasi dan Komunikasi Lingkungan, pihak swasta dari telkomsel maupun bank Jatim, humas Unisba dan masyarakat pengunjung Taman Pecut. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat, serta ide-idenya. Dalam melakukan

wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan baik dan teliti serta mencatat hal-hal apa saja yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Creswell, 2014). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Pada saat melakukan penelitian, peneliti memanfaatkan dokumen yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Blitar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk keperluan penelitian guna memecahkan suatu persoalan. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data berasal dari:

1. Peneliti

Pada penelitian ini yang awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dijadikan instrumen dikarenakan sekaligus sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data pada saat penelitian.

2. Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan *open ended questions* dan digunakan untuk menjadi penghubung informan dengan

memberi ruang untuk memperluas topik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk memaksimalkan deskripsi informan menceritakan pengalaman mereka saat melakukan segala kegiatan berkaitan dengan asuransi khususnya penjualan polis. Pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam daftar wawancara pertama merupakan hasil dari pertanyaan penelitian utama. Peneliti bisa menambahkan beberapa pertanyaan tambahan selain yang tercantum pada daftar pertanyaan wawancara, yang masih berhubungan dengan jawaban masing-masing informan. Jika jawaban informan terlalu sulit untuk dimengerti, peneliti bisa mencari klarifikasi melalui pertanyaan lain yang mencerminkan penjelasan kembali ke informan, untuk memperoleh akurasi. Semua informan ditanyakan pertanyaan yang sama sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara. Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan wawancara berikut untuk membantu setiap informan agar dapat secara penuh menggambarkan pengalaman mereka terkait pengelolaan RTH.

3. Alat-alat atau media pendukung

Alat-alat atau media pendukung yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu: kamera, telepon genggam (HP) untuk merekam, pensil, ballpoint, dan buku untuk mencatat hal-hal penting.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara sistematis. Proses analisis data

kualitatif berdasarkan pada adanya hubungan sistematis terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan sistematis dalam penelitian kualitatif sangat penting yaitu untuk menganalisis dan mengolah kembali data-data yang terkumpul sehingga menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. (Creswell, 2014: 274). Dalam teknik analisis data terdapat empat tahapan yang harus dilakukan yang pertama merupakan mengumpulkan data yang telah diperoleh, kemudian melakukan reduksi data, lalu *men-display* data yang telah direduksi, dan membuat kesimpulan serta verifikasi mengenai analisis data yang telah dilakukan. Berikut penjabaran mengenai teknik analisis data lebih lanjut berdasarkan Creswell (2014 :276-283).

a. Mengumpulkan Data

Data-data yang sebelumnya diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan. Selama penelitian berlangsung, seluruh pembicaraan pada saat melakukan pengumpulan data akan didokumentasikan. Cara mendokumentasikan dapat berupa rekaman suara, foto-foto saat wawancara, foto-foto dokumentasi untuk keperluan studi dokumen. Pendokumentasian ini diperuntukkan sebagai bukti bahwa penelitian dilakukan sebenar-benarnya.

b. Reduksi Data

Kemudian seluruh informasi terkait yang diperoleh dikumpulkan dan lalu akan dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menentukan informasi-informasi penting, dan telah dilakukan pencocokkan data kembali sehingga valid serta mengeluarkan informasi-informasi yang tidak relevan. Penyaringan data harus memperhatikan dengan seksama dan dilakukan berulang-ulang untuk memastikan data yang tersaring merupakan data pelengkap.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya dengan menampilkan (*display*) seluruh data yang telah melalui proses reduksi. Tampilan data ini bertujuan untuk *double check* data-data yang sebelumnya telah direduksi apakah sudah lengkap atau masih ada yang harus diperbaiki maupun revisi.

d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Lalu dilakukan analisis terhadap data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya setelah itu akan dibuatkan kesimpulan dan verifikasi terhadap data. Analisis yang dimaksud yaitu dengan memeriksa lagi dari A-Z seluruh data-data yang telah diperoleh setelah *display* data untuk mencegah kesalahan-kesalahan informasi yang berada didalamnya.

H. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. (Creswell, 2014) memaparkan tujuan dilakukannya pengujian kredibilitas data untuk melakukan penilaian dalam

menentukan kebenaran pada temuan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan saat partisipan mengungkapkan bahwa hasil transkrip penelitian memang benar sesuai dengan hasil penelitian. Terdapat beberapa teknik uji kredibilitas yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk melakukan pengecekan keabsahan data, dengan teknik pengecekan dalam menggunakan triangulasi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memiliki manfaat untuk suatu perbandingan terhadap objek penelitian (Creswell, 2014). Proses penelitian kualitatif ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki hubungan yang kuat dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren (Creswell, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian.

Menurut Sutopo (Creswell, 2014) data triangulasi yang merupakan cara yang digunakan dalam melakukan perencanaan data pada penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hasil yang didapatkan maka terdapat beberapa tahapan triangulasi untuk melakukan pengecekan yaitu: (a) triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (b) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (c) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), (d) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*) merupakan teknik dalam melakukan sesuai dengan

pemikiran fenomenologi yang memiliki sifat multiperspektif yang artinya melakukan penarikan kesimpulan yang diperlukan yang tidak hanya dari sudut pandang saja, melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil penelitian.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data/sumber, yakni mengumpulkan data yang benar sesuai dengan informasi melalui beberapa metode dan pengambilan melalui sumber dalam memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengambilan data melalui observasi dan pengambilan dokumentasi secara tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dari peneliti saat melakukan pengamatan lapangan dan melakukan pengambilan gambar. Berbagai cara yang dilakukan akan menghasilkan data yang berbeda, sehingga peneliti harus memberikan gambaran atau pandangan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi lapangan..

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengukur kredibilitas. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda (Moleong, 2007). Artinya, peneliti akan mencocokkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain guna meminimalisir kesalahan data yang dikumpulkan. Semakin banyak sumber yang menjawab secara konsisten maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut semakin kredibel.

Berpijak dari landasan teori dan pemikiran yang telah peneliti paparkan tersebut. Maka penelitian kualitatif dalam menggali informasi atau data penelitian digunakan kriteria dan triangulasi data dalam rangkaian untuk mencapai derajat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan data hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber atau informan setelah melalui analisis dan validasi digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Dikarenakan baik data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, atau yang lainnya, tingkat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan datanya rendah sudah dapat dipastikan hasil atau kesimpulan yang diperoleh pasti rendah atau tidak berkualitas.

2. Uji Dependabilitas

Selain menggunakan metode triangulasi data, untuk menjamin keakurasian data penelitian maka peneliti berusaha dengan terus menerus mengaudit keseluruhan proses penelitian mulai dari awal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian, sampai pada akhir penelitian. Sebelum ditarik suatu kesimpulan, peneliti selalu melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian atau disebut dengan *dependability*/reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable*, saat orang lain melakukan pengulangan data atau replikasi data dalam proses penelitian, dalam penelitian *dependability* dapat dilakukan dengan melakukan audit dan pengecekan ulang terhadap keseluruhan dalam proses penelitian.

Pengecekan data tersebut dilakukan dengan meneliti kembali hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Apabila terdapat

pernyataan yang ambigu terkait dengan jawaban responden maka dapat dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan jawaban yang benar sehingga interpretasi yang dilakukan peneliti tepat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14 - 112^{\circ} 28$ Bujur Timur $8^{\circ} 2-8^{\circ}$ Lintang Selatan tepatnya berada di tengah wilayah memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dengan jarak 160 km arah tenggaran dari ibu kota Provinsi Surabaya.

Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15° , bagian tengah 175 m dan bagian Selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2° . Dilihat dari Topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. Kota Blitar dibagi menjadi 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan.

Penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Blitar dibagi menjadi 2 yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah/lahan kering. Lahan sawah di Kota Blitar

mempunyai luas 1.141 ha dan lahan kering mempunyai luas 2.115 ha. Berdasarkan penggunaan lahan menurut penggunaannya di Kota Blitar terdiri dari swah, bangunan/pekarangan, tegalan, kebun, kolam, empang, dan lain-lain. Dari luas lahan Kota Blitar 3.256 ha, paling banyak diusahakan untuk bangunan/pekarangan adalah 51,12%, swah adalah 35,04% dan yang diusahakan untuk lain-lain adalah 12,44%.

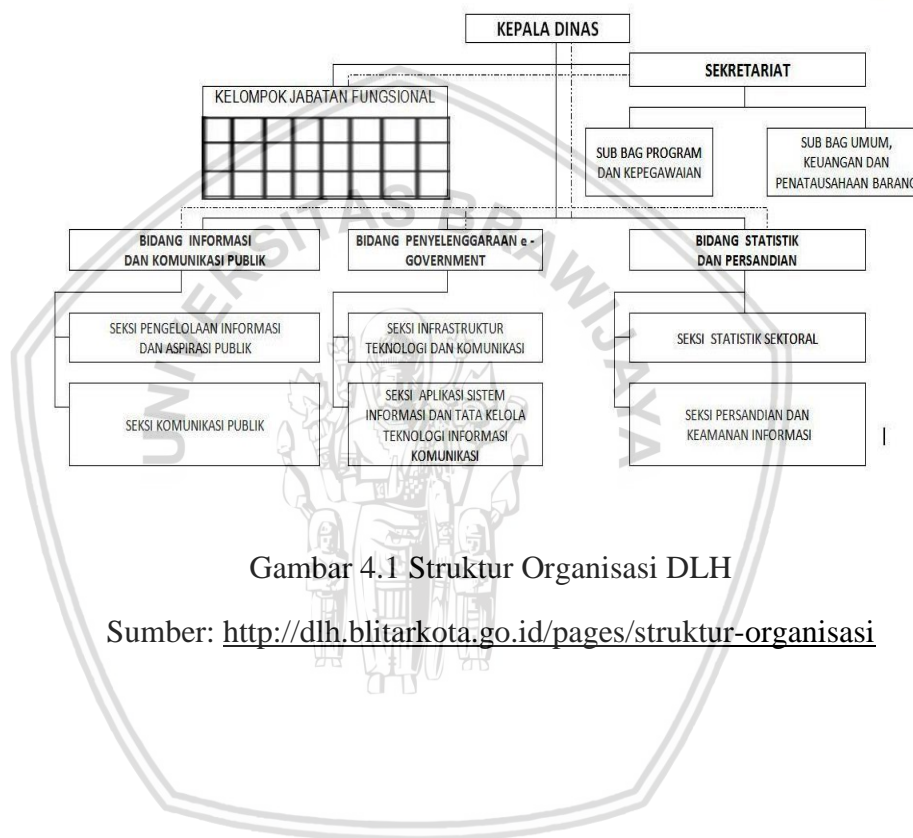
Apabila dilihat dari kondisi pemanfaatan lahan yang ada, penggunaan lahan Kota Blitar masih terhadap cukup ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka non hijau (RTNH). Penyediaan RTH bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan, resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar dan bersih.

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diuraikan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Posisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan

yang merupakan kewenangan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLH

Sumber: <http://dlh.blitarkota.go.id/pages/struktur-organisasi>

B. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Aktor Sebagai Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Model *Triple Helix*

a. Kerjasama Antar Aktor dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Perspektif *Triple Helix*

a) Kerjasama Pemerintah Kota Blitar Dengan Lembaga Pendidikan atau Akademisi

Upaya pelibatan akademisi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan melaksanakan program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan). Program Adiwiyata adalah suatu program yang bertujuan menciptakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, dimana program ini sangat efektif dan strategis dalam upaya pengembangan pendidikan berbasis lingkungan hidup. Terciptanya pengetahuan dan kesadaran akan lingkungan hidup perlu didorong dari semua unsur warga sekolah yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, tenaga non kependidikan serta karyawan sekolah dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan serta turut pula bertanggung jawab dalam upaya terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

SMP Negeri 9 Blitar mencanangkan Program Adiwiyata. Latar belakang pencanangan Program Adiwiyata di SMP Negeri 9 Kota

Blitar yakni luas lahan yang mencapai 8.176 m² yang dapat memberikan potensi yang sangat luas untuk pengembangan sekolah juga menyisakan beberapa permasalahan lingkungan yang perlu penanganan serius dan melibatkan warga sekolah secara keseluruhan. Maka pada dekade tahun 2013-an mulailah dicanangkan sekolah peduli lingkungan, walaupun pada saat itu belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penugasan Program Adiwiyata. Hingga pada tahun 2014 mulai diadakan koordinasi-koordinasi dengan komite, wali murid dan *stakeholder* lainnya, sehingga akhirnya terbentuk sebuah kesepakatan bersama untuk menjadikan sekolah Adiwiyata dan dibuatlah SK Penugasan Penanganan Adiwiyata yang terdiri dari kelompok kerja dengan harapan adanya program Adiwiyata di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengatasi efek samping dari luasnya lahan, sekaligus sebagai sarana untuk pendidikan karakter cinta lingkungan terhadap seluruh warga SMPN 9 Kota Blitar. Dengan semakin meningkatnya kesadaran cinta dan peduli lingkungan, diharapkan nantinya dapat mencetak kader-kader bangsa yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar juga mencanangkan program Adiwiyata. MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar untuk pertama kalinya mengawali program Sekolah Adiwiyata pada awal tahun 2012. Saat itu MTsN Kepanjenkidul

Kota Blitar telah dinyatakan lolos administrasi Adiwiyata Provinsi, namun kandas setelah dilakukan visitasi oleh Tim Penilai Provinsi. Kegagalan tersebut tidak menyurutkan langkah MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar untuk terus berbenah dan berjuang untuk memperbaiki diri demi tercapainya “Hijau Madrasahku, Tumbuh Prestasiku”. Setelah satu tahun, MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar akhirnya mendapat penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Kota Blitar pada tahun 2013, di tahun 2015 MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar melanjutkan tekadnya untuk melenggang ke tingkat Provinsi dan akhirnya dapat merengkuh penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata pada tahun 2016.

Latar belakang pelaksanaan Program Adiwiyata di MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar dengan luas lahan yang dimiliki yakni sebesar 7.856 m² dan luas lantai bangunan 2.080 m² yang masih terbuka digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar masih memiliki lahan atau area yang masih sangat terbuka dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah, sumber air bersih yang terus mengalir dan tidak kering disaat musim kemarau, struktur tanah yang baik dan subur untuk tanaman, serta udara yang sejuk. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah diantaranya: *green house*, taman, kolam ikan,

tandon air mustakmal, sarana bermain dan olahraga. Kegiatan kesiswaan banyak mengarah pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah, seperti jumat bersih, perawatan sumber mata air, pembuatan lubang biopori, pengelolaan *green house*, taman, kolam ikan sebagai sarana belajar, memperingati hari-hari lingkungan hidup sedunia, mengolah sampah/ barang bekas menjadi barang bernilai, dan mengikuti agenda kegiatan lingkungan yang diselenggarakan pemerintah kota.

Program Adiwiyata juga dilaksanakan di SDN Sananwetan 2 Kota Blitar. Latar belakang pelaksanaan Program Adiwiyata yakni melihat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan sekolah yang menjadi salah satu penyebab munculnya sampah yang menumpuk. Bungkus-bungkus plastik dari makanan ringan yang berserakan, bekas-bekas makanan juga banyak ditemukan di tempat dimana para pedagang tersebut berjualan. Hal ini tentunya sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan warga sekolah. Pengolahan sampah yang kurang baik, juga sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Karena sampah-sampah tersebut menimbulkan bau yang sangat mengganggu kegiatan pembelajaran. Di samping itu jajanan yang dijual oleh pedagang, baik pedagang kaki lima maupun kantin sekolah dikhawatirkan banyak yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Hal ini dapat diketahui dari warna makanan yang sangat mencolok dan menarik,

aroma jajanan yang sangat tajam, serta jajanan yang kenyal. Dari beberapa permasalahan tersebut menjadi inspirasi untuk melakukan langkah cepat guna menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, asri, dan nyaman. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kepedulian semua warga sekolah terhadap lingkungan, utamanya menanamkan budaya hidup bersih, mengkonsumsi makanan bebas 5P (Pengawet, Perasa, Pemutih, Pemanis, Pewarna), serta penghematan energi. Oleh karena itu, SDN Sananwetan 2 Kota Blitar melangkah menuju sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata.

Selain pelaksanaan program Adiwiyata, sekolah-sekolah yang terdapat di Kota Blitar mengikuti program-program dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional pada tahun 2016 Kota Blitar. Program-program tersebut meliputi Lomba Lukis Lingkungan yang diikuti oleh peserta tingkat SD sampai SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 200 orang, Lomba Jingle Lingkungan yang diikuti oleh siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 300 orang, Lomba *Fashion Show* Pakaian Daur Ulang yang diikuti oleh peserta tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 150 orang, dan Lomba Hemat Energi yang diikuti oleh Sekolah Adiwiyata se-Kota Blitar.

Lebih lanjut, Unisba (Universitas Islam Blitar) sebagai salah satu lembaga pendidikan di kota Blitar dalam proses pengembangan RTH di Kota Blitar dianggap tidak begitu terlibat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Denok Wahyudi sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kita selaku lembaga pendidikan yang berada di bawah pemerintahan kota Blitar ingin membantu program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau yang semakin menurun. Namun kita disini hanya sebatas membantu mensosialisasikan kepada masyarakat saja tidak ikut serta baik dalam perencanaan maupun pemetaannya”.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pihak intelektual dalam pengembangan RTH di kota Blitar yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan seperti Unisba, SMP Negeri 9 Blitar, MTsN Kepanjenkidul Kota Blitar, dan SDN Sananwetan 2 Kota Blitar. Mereka hanya sebatas mensosialisasikan saja tidak untuk membantu dalam pemetaan maupun perencanaan.

b) Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan harga diri, percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum papa yang termasuk kategori “*The silent majority*”,

keterlibatan mereka boleh dikata tidak ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.

Secara normatif masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam pengaturan tata ruang, dapat dilihat pada Konsideran butir D Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa "keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan". Sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan serta masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), termasuk masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga disebutkan secara tegas tentang peran masyarakat, dalam Pasal 65, bahwa "Pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan peran masyarakat" Penataan Peran masyarakat tersebut, dilakukan antara

lain melalui: 1) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas yang antara lain meliputi: keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas, dan terhadap peran serta masyarakat dalam pengaturan penataan ruang digunakan pendekatan yang demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “*community driven planning*” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang interaktif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah kota Blitar melakukan upaya-upaya untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan kepentingan bersama. Hal tersebut, kita sadari bersama bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang terbuka hijau berkelanjutan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*),

penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap *stakeholder* harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja penataan ruang terbuka hijau Kota Blitar.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sundusin selaku Kepala Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar yang menyatakan sebagai berikut:

“Kerjasama pemerintah dan masyarakat yang kompak pastinya akan membuat kerja pemerintah semakin ringan dan baik karena didukung dengan kerjasama yang baik dari masyarakat. Kalau sudah gini pembangunan dan pengembangan RTH Kota Blitar akan semakin meningkat”.

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Komunikasi Lingkungan yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Blitar dengan masyarakat dalam hal ini saling bekerjasama membangun Kota Blitar melalui pengembangan RTH pasti akan menjamin kesuksesan pemerintah Kota Blitar soalnya mereka tidak bekerja sendiri sehingga akan terasa lebih ringan”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama atau kolaborasi pemerintah kota Blitar dan masyarakat telah dilakukan akan tetapi belum maksimal. Perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan membantu mempercepat proses pembangunan dan pengembangan RTH yang ada dikota Blitar.

Dengan penjelasan diatas, adanya kerjasama pemerintah kota Blitar dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan, pembangunan, dan pengembangan tata ruang terbuka hijau karena pada akhirnya hasil pembangunan ruang terbuka hijau adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan menikmati manfaat ruang berupa manfaat ekonomi, sosial, lingkungan sesuai tata ruang, serta demi tercapainya tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Peran serta masyarakat di bidang tata ruang semula diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996 yang merupakan peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 kemudian muncul kembali pengganti atas PP Nomor 69 Tahun 1996 yang pada tahun 2010 di tetapkan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Berdasarkan undang-undang yang dijelaskan diatas masyarakat memiliki peran yang penting salah satunya adalah pada bidang

RTH. Dalam memanfaatkan perannya pemerintah Kota Blitar melakukan berbagai macam upaya dalam melibatkan masyarakat pada perencanaan pembangunan RTH. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Sundusin selaku Kepala Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya salah satu usaha kami adalah menghubungi pihak kecamatan hingga kelurahan dimana RTH kan dibuat setelah itu kami meminta 3-5 orang relawan yang terdiri dari unsur masyarakat untuk membantu kami terlibat secara langsung pada proses perencanaan pembangunan atau pengembangan RTH di Kota Blitar”.

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bapak Nuril yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan RTH kota Bitar yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau peran saya sebagai masyarakat dan yang diutus pak lurah saat pembangunan taman Sentul yang diajukan oleh pak lurah habis itu jika ada rapat atau kordinasi perencanaan pembangunan RTH dalam hal in taman sentul kami yang tergabung dalam unsur masyarakat diajak bekerjasama artinya memberikan saran dan berbagi macam ide-ide sebelum proses pelaksanaan”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintah kota Blitar telah melakukan kerjasama dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat pada proses pembangunan dan pengembangan RTH yaitu pada saat perencanaan dan pengawasan terhadap fungsi RTH.

Kerjasama yang terjadi antara pemerintah kota Blitar serta masyarakat akan peran serta masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan pendapat, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).

Di samping hak masyarakat kota Blitar untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau, masyarakat juga wajib menjaga kualitas ruang dengan mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Di samping kewajiban menjaga kualitas ruang, peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai *stakeholders* yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang terus menerus sepanjang keseluruhan proses penataan ruang akan terjadi proses

pembelajaran bersama dan pemahaman bersama (*mutual understanding*) berbagai pihak tentang penataan ruang.

Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 114) dalam upaya mengelola RTH ada dua faktor partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu: 1) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif; 2) Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat.

c) **Kerjasama Pemerintah dengan Instansi Pemerintah yang Lain**

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999:52) menjelaskan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup pemerintah dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Fungsi pertama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor.

Menurut George R Terry (dalam Inu Kencana Syafie, 2011:81-82) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan

fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintahan yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan,

Peran Pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan yaitu membuat kebijakan/ peraturan terkait lingkungan hidup. Untuk menjalankan kewajiban dalam usaha melestarikan lingkungan, perlu adanya dukungan secara hukum, sehingga upaya pelestarian lingkungan hidup dapat diterapkan secara maksimal. Peraturan-peraturan daerah bidang lingkungan yang telah diterbitkan di Kota Blitar antara lain:

Tabel 4.1 Peraturan-peraturan daerah bidang lingkungan Kota Blitar

No.	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1	Peraturan Daerah	12	2011	Rencana tata ruang dan rencana wilayah Kota Blitar
2	Peraturan Walikota	37	2012	Kota Blitar tanpa kendaraan bermotor
3	Peraturan Walikota	39	2012	Jenis usaha dan / kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL di Kota Blitar
4	Peraturan Walikota	32	2013	Tata Cara Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Usaha dan / kegiatan di Kota Blitar.
5	Peraturan Walikota	66	2014	Izin Lingkungan
6	Peraturan Walikota	21	2015	Peran Masyarakat Dalam Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan
7	Peraturan Walikota	47	2015	Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah di Kota Blitar
8	Peraturan Walikota	89	2016	Perlingdungan Mata Air dan pemanfaatan Air Hujan.

Sumber: penulis

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar. Peran Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- 1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam masalah ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga

kesehatan yang merugikan makhluk hidup. Adanya kebijakan ini dikarenakan minimnya proporsi ruang terbuka hijau yang ada di kota Blitar dimana tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Blitar tidak terlepas dari ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah Kota Blitar yaitu dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali). Namun peraturan tersebut belum dapat dikatakan mantap. Walaupun begitu Peraturan Walikota tersebut tetap menjadi kekuatan bagi Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola ruang terbuka hijau karena di dalam nya terdapat peraturan mengenai penetapan lokasi ruang terbuka hijau bagi pihak pengelola ruang terbuka hijau.

Mengenai pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilakukan pihak pengelola khususnya DLH yang memiliki peran paling penting dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau, maka dinas pengelola khusus ruang terbuka hijau melakukan tugasnya tidak hanya pembangunan ruang terbuka hijau melainkan juga pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada yaitu dengan penanaman pohon di taman-taman yang ada di kota Blitar, di pinggir-pinggir jalan dengan tanaman yang mudah tumbuh berkembang dengan cepat. Selain itu pihak DLH juga melakukan usaha peremajaan pohon dengan pohon-pohon baru yang memiliki akar pohon yang lebih kuat dan daunnya lebih rindang. Perawatan

rutin pemeliharaan ruang terbuka hijau juga dilakukan pihak pengelola untuk ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Blitar dalam mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau adalah telah dijelaskan oleh bapak Sundusin selaku Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar”

“Untuk peningkatan RTH di Kota Blitar, salah satunya dengan menambah populasi tanaman. Kegiatan itu juga karena ada dorongan sebagai kota Adipura. Dari adanya *reward* itu, sebagai penyemangat untuk menata RTH, memelihara, dan terus menambah populasi tanaman di Ruang terbuka Hijau. Dari itu, berdampak pula pada estetika kota jadi baik. Adapun hal ini kami bekerja sama dengan berbagi macam instansi pemerintahan yang lain seperti dinas PU, Dinas Pertanian dan yang lainnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa menambah populasi tanaman menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi RTH di kota Blitar. Menambah populasi tanaman menjadi upaya yang sangat memungkinkan guna meningkatkan Ruang Terbuka Hijau bagi suatu kota, karena dengan menambah populasi tanaman yang ada tentunya akan membuat sebuah kota menjadi lebih terasa nyaman dan indah, sehingga ekosistem lingkungan dapat lebih seimbang sebagaimana tujuan dari adanya RTH itu sendiri. Dengan lingkungan yang seimbang, selain itu juga pengembangan RTH pemerintah Kota Blitar melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait untuk membantu program RTH.

Menambah populasi tanaman dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari meningkatkan tanaman di halaman tempat tinggal, kantor, sampai taman-taman di pemukiman warga. Guna memaksimalkan terlaksananya kegiatan ini, pemerintah dapat membantu dengan pengadaan bibit-bibit tanaman, sehingga masyarakat akan lebih antusias karena ada campur tangan pemerintah yang peduli terhadap lingkungannya. Kegiatan ini tentunya akan membangkitkan peran serta masyarakat untuk peduli dengan lingkungannya. Lebih banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan niscaya akan lebih mudah untuk mencapai suatu tatanan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Bapak Moh. Khusnur Rofieq selaku Kepala Bidang Pertamanan DLH Kota Blitar bahwa:

“Kalau RTH kita memberikan bantuan bibit tanaman beserta pot bunga. Misalnya kita memberikan bantuan di kawasan pemukiman, contohnya di pemukiman yang ada di Jalan Melati. Di kawasan sana kita mendorong masyarakat untuk menanam tanaman. Jadi ini bukan taman pribadi ya, ini taman publik yang ada di daerah pemukiman. Selain bantuan-bantuan di kawasan pemukiman. Selain memberikan bantuan ke wilayah-wilayah tersebut, kita juga melakukan penanaman pohon pelindung di pinggir jalan umum dan di jalur hijau.”

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kota Blitar dalam hal meningkatkan kualitas dan mempertahankan fungsi Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah dengan cara memberikan bantuan tanaman di daerah pemukiman. Selain

itu, pemerintah daerah juga melakukan penanaman bibit pohon lindung di pinggir jalan umum dan jalur hijau agar kualitas udara tetap terjaga.

Setelah dilakukan penanaman, pemerintah Kota Blitar juga melakukan pemeliharaan dan pengawasan, yakni dengan penyiraman tanaman secara rutin. Pemeliharaan tanaman merupakan proses menciptakan, menjaga, dan memulihkan kestabilan kondisi tanaman dari stabilitas cuaca, iklim, penyakit tanaman (hama), dan kebutuhan tanaman akan zat-zat hara, kebutuhan air dengan tujuan supaya setiap tanaman yang ada dalam pengawasan kondisinya baik sesuai dengan harapan.

2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi

Seperti halnya kota-kota yang ada di Indonesia salah satunya Kota Blitar juga mengalami peningkatan udara yang semakin tinggi khususnya pada siang hari sehingga memerlukan upaya dalam pengendalian. Pengembangan kawasan kota Blitar dengan berbagai aktivitas dan pola kehidupan penduduknya menuntut kebutuhan penggunaan lahan pada kawasan pusat kota Blitar seringkali menunjukkan perubahan secara alamiah tanpa mengikuti program dan rencana penataan ruang kota yang telah dibuat. Adanya keterbatasan luas lahan dipusat kota Blitar mengakibatkan optimalisasi fungsi lahan sebagai lahan terbangun sehingga cenderung mengakibatkan pembangunan ruang terbuka hijau

kurang optimal. Disamping itu terjadi pula perubahan fungsi yang semula berupa lahan terbuka akan menjadi bangunan, terutama didaerah perbukitan yang ada disekitar pusat kota Blitar.

Pengalihan fungsi ruang terbuka hijau menjadi permukiman ataupun gedung-gedung yang menjadi tugas dari Dinas PU dan Tata Ruang yaitu dengan memberikan izin atas bangunan yang akan didirikan terkadang menjadi konflik juga bagi DLH sebagai pengelola ketersediaan ruang terbuka hijau karena dengan adanya pembangunan biasanya mengurangi ruang terbuka hijau yang telah ada. Semua akibat kurangnya kerjasama antar pihak pengelola. Sedangkan pihak Dinas PU dan Tata Ruang sebagai pihak yang memberikan izin bangunan hanya bertugas memberikan izin saja namun tidak dapat disalahkan oleh pihak manapun. Dalam hal ini semuanya tentu kembali kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi pembebasan lahan yang dimiliki warga.

Adanya intervensi dari swasta juga menyebabkan perubahan fungsi lahan. Karena pada dasarnya pihak swasta lebih mementingkan keperluan bisnis untuk mendapatkan hasil. Dan itu sudah jelas dapat mengurangi ruang terbuka hijau yang ada di kota Blitar. Namun gedung-gedung tinggi nantinya yang akan dibangun tetap dapat menciptakan ruang terbuka hijau dengan cara menanam bibit pohon diatas gedung dengan menggunakan vas bunga.

Terkait mengenai fungsi ruang terbuka hijau yang dimana banyak disalah fungsikan oleh masyarakat yaitu banyaknya masyarakat Kota Blitar yang berkunjung ke taman-taman yang seharusnya dijaga kebersihannya dan fungsinya namun masyarakat tidak memperhatikan tindakan yang telah dilakukannya dapat merusak taman contohnya banyak masyarakat yang berkunjung ke taman dengan berjalan direrumputan dalam taman sehingga dapat merusak keindahan rumput-rumput yang ada di taman. Selain itu ada juga para pedagang kaki lima yang berdagang di dalam taman sehingga merusak keindahan taman karena masyarakat yang berkunjung ke taman membuang sampah makanan baik sampah organik maupun anorganik sembarangan sehingga udara di taman tidak sehat yang disebabkan sampah-sampah tersebut.

Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan hanya dalam bentuk himbauan saja mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusak, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Namun, selain itu pengawasan yang dilakukan pula kedepannya dengan membangun plang – plang dilarang mendirikan bangunan di kawasan ruang terbuka hijau, dilarang merusak tanaman di kawasan taman ruang terbuka hijau. Dampak lingkungan yang diterima dari adanya Ruang Terbuka Hijau ini

ialah tentu sangat positif yaitu sebagai tempat berkumpul keluarga, rekreasi, refreshing, edukasi dan lain sebagainya. Kawasan tersebut pula akan menjadi *landmark* dari kelurahan tersebut bahkan daerah kota Blitar.

Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam bentuk penghimbauan mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusaki, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Moh. Khusnur Rofieq selaku Kepala Bidang Pertamanan yang menyatakan bahwa:

“untuk mengawasi RTH kita melakukan himbauan kepada masyarakat secara rutin, agar RTH dapat terjaga sebagaimana fungsinya. Khususnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk yang sering memanfaatkan taman-taman lingkungan untuk kegiatan seperti kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Padahal lahan tersebut termasuk dalam RTH. Harusnya dapat izin terlebih dulu dari pemerintah. Jadi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga Untuk pengawasan yang utama dari sini itu penyiramaan, tanaman yang paling utama kan siraman, kalau musim hujan kan tidak apa-apa, kalau kemarau gini ya harus melakukan penyiraman”

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan dan penertiban secara periodik di lokasi taman atau ruang terbuka hijau harus dilakukan secara berkala kepada masyarakat sekitar dan menetapkan sanksi sesuai Perda yang berlaku jika ada pelanggaran

yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi diberikan guna membantu untuk menghindari adanya lokasi-lokasi taman yang dipergunakan untuk kegiatan non taman tanpa seijin instansi terkait, umumnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk. Bentuk pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat sekitar pemukiman dalam mengubah fungsi RTH disekitarnya adalah dengan dibangunnya kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Pengawasan utama yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat adalah dengan melakukan penyiraman pada tanaman di RTH. Penyiraman dilakukan ketika bukan musim hujan, karena jika musim hujan tanpa melakukan penyiraman pun tidak dipermasalahkan karena secara otomatis, tanaman akan selalu segar karena terkena oleh air hujan. Namun jika masuk pada musim kemarau, tanaman tidak akan segar tanpa dilakukan penyiraman.

- 3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya.

Pembangunan wilayah perkotaan perlu memasukkan unsur lingkungan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai suatu strategi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam dan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam yang ada guna mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat sebatas kemampuan dan daya tampungnya dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari penataan ruang kota perlu ditetapkan keberadaannya secara serius, direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat dengan peraturan yang tegas untuk memperjelas status hukumnya. Dengan demikian pengembangan dan pengelolannya lebih terarah serta dapat menghindari perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi fungsi lainnya, dan mengupayakan terciptanya Kota Hijau sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Di dalam Pasal 9 peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa Luas Ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan menegaskan bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta prosedur perencanaan dan peran serta masyarakatnya.

Daerah perkotaan menjadi salah satu faktor tingginya tekanan kehidupan yang cukup besar di pusat kota. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka publik di pusat kota, terutama ruang terbuka hijau di perkotaan sangat diperlukan karena fungsi dan peranannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan

sosialisasi dan rekreasi serta menjadi alternatif tempat istirahat untuk mencari udara segar di tengah kesibukan kegiatan di pusat kota yang begitu padat dan menghilangkan kepenatan setelah bekerja keras dengan biaya yang sangat murah. Adanya ruang terbuka hijau kota menjadi salah satu penyelesaian dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, dimana dampak yang paling mudah kita rasakan.

Kota Blitar adalah salah satu kawasan atau daerah yang melakukan penambahan RTH saat ini. Hal tersebut berdasarkan dengan berita online yang menjelaskan bahwa Pemkot Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berencana menjadikan sejumlah tempat jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) salah satunya yang masuk pada tahap perencanaan pengembangan adalah taman Taman Pecut dan Taman di Tanjungsari.

Selain dua taman diatas, perencanaan pembangunan RTH juga yang dilakukan oleh Pemkot Blitar yaitu dengan dibangunnya hutan kota yang di daerah Pakunden dan Bendo. Pembangunan tersebut akan dilakukan bertahap hingga tahun tahun 2018 ini. Tema bangunan dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam bagi warga Kota Blitar dengan berisikan sejumlah wahana main bersifat alam dan taman bacaan untuk pengunjung. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar tahun 2018 kembali menganggarkan pembangunan untuk Hutan Kota Blitar

sebesar Rp 2 miliar. Pembangunan hutan Kota ini adalah pembangunan tahap kedua setelah pada tahun 2017 selesai tepat waktu dan sudah bisa dinikmati masyarakat.

Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaanya. Prosedur dalam pembangunan RTH Blitar juga dijelaskan oleh Ibu Endang Kurnia selaku Kepala Bidang Pertamanan DLH Kota Blitar yang menjelaskan sebagai berikut:

“Proses dalam menambah lahan baru. Proses yang pertama pembuatan Pra desain, Pra desain dapat berupa gambar 3D, foto udara, layout. setelah itu muncul DED (*detail engineering design*) atau perencanaan, dan pembangunan fisik setelah itu saat pembangunan fisik ada 3 unsur konsultan perencana, ada unsur konsultan pengawas, dan konsultan pelaksana atau kontraktor ini berdasarkan Kepres .”

Pernyataan tersebut jelas memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Guna memenuhi keseimbangan ekosistem lingkungan alam dan buatan, pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melakukan penambahan lahan yang akan digunakan untuk Ruang terbuka Hijau. Penambahan lahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara di atas melalui beberapa tahap perencanaan. Dalam tahap pre desain, pemerintah terlebih dulu menyiapkan gambar 3D, foto udara, dan layout sebagai gambaran dalam

pembangunan RTH. Tahap selanjutnya yaitu *detail engering desain* dengan menyelesaikan desain yang sudah dipilih dalam tahap sebelumnya. Selanjutnya pada tahap pembangunan, pemerintah juga menyiapkan konsultan baik dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan.

Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaannya. Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sundusin selaku Kepala Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar yang menyatakan sebagai berikut”

“Pelaksana pembangunan taman yang baru harus dilakukan sesuai dengan prosedur itu seperti 2017 di Taman Sentul, atau Taman Kebon Rojo dan kalau renovasi juga sama karena harus dirobohkan dan dimulai dari nol. Dan sumber referensi yang melakukan ahli semuanya pra desain dilakukan arsitek, teknik sipil diserahkan ketenaga ahli setelah itu dituangkan didalam perencanaan anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Blitar melakukan penambahan lahan RTH yang cukup tinggi dimulai dari bangunannya taman Tanjungsari dan Taman Pecut yang kini juga dilanjutkan dengan pembangunan Taman Sentul yang mencapai luas 0,9 Hektar yang digunakan sebagai fasilitas umum warga Blitar dengan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk publik.

Penambahan lahan RTH yang dilakukan oleh DLH dan Pemkot Blitar selain mengikuti peraturan perundang-undangan juga dilakukan karena banyaknya RTH yang ada akan memberikan manfaat untuk warga Blitar sendiri misalnya dalam hal ini Taman Pecut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan.

RTH pada umumnya didominasi tanaman dan tumbuhan yang banyak berpengaruh pada kualitas udara kota. Tanaman dapat menciptakan iklim mikro, yaitu penurunan suhu sekitar, kelembaban yang cukup, kadar oksigen yang bertambah karena adanya proses asimilasi dan evapotranspirasi dari tanaman. Tanaman juga menyerap (mengurangi) karbondioksida di udara hasil kegiatan industri, kendaraan bermotor, dsb. RTH dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk konsumsi 1500 orang per hari. Kota yang baik seyogyanya membuat warga kota sehat dengan kenyamanan dan kualitas lingkungan yang dimilikinya. Hal itu juga dirasakan oleh warga atau masyarakat yang berada di daerah Taman Pecut yang telah merasakan manfaat adanya RTH dan menginginkan pembangunan RTH kota Blitar dilakukan sebanyak mungkin.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suparno masyarakat disekitar Taman Pecut yang mengatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah lo mbak, semenjak dibangunnya Taman Pecut ini udara gak panas, terus tempat main anak ada sambil refresing keluarga dan katanya tahun ini (2018) sarana dan prasarana akan dilengkapi kayak alat-alat bermain dan sebagainya pokok dukung pol kalau bangun kawasan yang enak kayak gini”

Wawancara di atas menjelaskan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penambahan lahan untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar. Penambahan lahan yang dilakukan diantaranya dengan membangun Taman Pecut. Keberadaan Taman Pecut disinyalir dapat membantu dalam proses penurunan suhu lingkungan yang awalnya kota Blitar cenderung panas. Setelah dibangun Taman Pecut sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau lingkungan di sekitar lokasi dapat lebih asri dan nyaman. Masyarakat juga dapat menikmati lingkungan dengan menghabiskan waktu bersama keluarga karena fasilitas yang disediakan.

Manfaat yang dapat dirasakan dari adanya penambahan lahan untuk Ruang terbuka Hijau dapat menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola RTH. Apalagi banyak masyarakat yang menilai positif adanya penambahan lahan untuk RTH, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mencapai keseimbangan kota. Hal tersebut dikarenakan, setiap masyarakat

pada dasarnya mempunyai keinginan sama untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan tenang, sehingga tempat tinggal mampu menjadi obat untuk menghilangkan segala kepenatan yang berasal dari luar lingkungan.

Hasil penelitian diatas juga didukung dengan pernyataan dari bapak Suyoko salah satu pengunjung Taman Pecut yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ada wacana nambah lahan lagi mbak buat kawasan hijau seperti taman dan hutan kota saya dukung banget ya, soalnya enak buat ngilangin sumpek apalagi kan Blitar juga panas banget. Ya kalau bisa lahan-lahan yang nganggur itu buat RTH saja biar asri kotanya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Blitar sangat mendukung kinerja pemerintah kota Blitar melalui DLH terkait dengan penambahan lahan yang digunakan untuk pembangunan RTH karena warga Blitar menyadari bahwa RTH memiliki manfaat yang banyak dan fasilitas hiburan bagi warga Blitar.

- 4) mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan,

anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Komunikasi Lingkungan yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, karena masyarakat selain sebagai pelaku dalam pembangunan juga bertindak sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat yang melakukan masyarakat pula yang merasakan. Jadi, tanpa adanya peran masyarakat dalam pembangunan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dibutuhkan yang nantinya dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pembangunan itu sendiri.”

Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku

kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/ aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat dapat dipandang (sebagai suatu upaya) untuk membantu Negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna. Peran serta masyarakat ini mensyaratkan pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna. Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan bapak Suharto yang menyatakan sebagai berikut:

“peran masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lahan pertanian yang akan dialihfungsikan memang harus dilibatkan karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga kontribusi masyarakat sangat diperlukan sehingga lahan yang dibebaskan untuk digunakan RTH tidak ganggu haknya masyarakat”

Penataan ruang pada dasarnya mengatur kegiatan masyarakat dalam ruang. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari penataan ruang, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya.

b. Peran Aktor Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**a) Peran Pihak Swasta dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Kota merupakan kawasan utama yang menjadi destinasi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Setiap tahunnya, masyarakat pedesaan berbondong-bondong untuk hijrah ke kawasan perkotaan. Kota dinilai sangat menjanjikan bagi masyarakat terutama dalam mendukung sektor perekonomian. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka privat sebanyak 10% dari luas wilayah kota.

Namun pada kenyataan saat ini Kota Blitar hanya memiliki RTH sebanyak 10.7% dari luas wilayah yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor misalnya pemerintah kekurangan anggaran dan sumberdaya manusia dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat terkait pengembangan ruang terbuka hijau. Hal

tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Umi Nadhiroh selaku staff DLH kota Blitar yang menjelaskan sebagai berikut :

“Peranan pemerintah merupakan peran utama terkait dengan RTH karena selaku penanggung jawab bisa dibilang yang punya kewenangan dan *stakeholder* yang lain mendukung dan harapannya ada masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan untuk mendukung salah satunya dalam hal pengelolaan terkait kalau dikota blitar dari segi kuantitas yaitu sesuai dengan tuntutan perda harus sebanyak 20% dari luas wilayah sedangkan yang dimiliki oleh Blitar sakarang hanya 10.7 %”.

Hal tersebut diduung dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sapto Triyono selaku Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan yang menjelaskan sebagai berikut :

“iya mbak sampai saat ini RTH yang ada di Kota Blitar memang belum sampai 30% seperti target yang ditentukan oleh Undang-undang tapi kami sedang berusaha bersama dengan Dinas PU, dan pihak-pihak terkait bagaimana menambah RTH “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kota Blitar sampai saat ini belum mencapai target yang sesuai hal tersebut dikarenakan berbagi macam faktor misalnya saja kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sampai dengan pembangunannya yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Dalam pembangunan era reformasi dan otonomi ini perlunya kondisi yang dimana pemerintah, swasta dan masyarakat dapat melakukan suatu kegiatan yang aman, tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya pemerintah harus

melibatkan swasta serta masyarakat untuk menjamin proses desentralisasi secara baik dan bertanggung jawab dimana mereka sebagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah Kota Blitar perlu menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memerlukan bantuan berupa tambahan berupa investasi dari pihak swasta dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini mengingat adanya keterbatasan yang dimilikinya baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan sumber daya lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat sebagai penikmat ruang terbuka hijau.

Peran pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan ketersediaan RTH di Kota Blitar. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan terkait ketersediaan RTH. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menambah ketersediaan RTH di Kota Blitar. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Pande Ketut selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan sebagai berikut:

“ya sampai saat ini memang pemerintah dan pihak swasta belum memiliki kerjasama yang konsisten khususnya pada

pengembangan RTH kota Blitar adanya CSR dari pihak swasta pun gak punya peran yang berarti karena biasanya mereka hanya menambah fasilitas saja “.

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan dari bapak Sapto Triyono selaku Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan yang menjelaskan sebagai berikut :

“kalau untuk kerjasama yang tertulis diantara pemerintah kota Blitar dengan pihak swasta terkait dengan pengembangan RTH belum ada mba, dan sampai saat ini pun belum ada pihak swasta yang mengajukan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun RTH tapi kalau hanya menambah fasilitas ya ada”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terjalin adanya kerjasama atau kemitraan yang baik dan berlanjut antara pemerintah kota Blitar dengan pihak swasta untuk bekerja sama dalam melakukan pengembangan RTH.

Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan staff Telkom Kota Blitar seperti kutipan berikut:

“ iya mbak saya disini merupakan salah satu pihak swasta yang ikut peran dalam pengembangan RTH di Kota Blitar, namun disini kami hanya membantu memfasilitasi saya seperti membelikan layanan wifi gratis di taman kota. Diharapkan ini dapat membantu dalam pengembangan RTH, diantara pihak swasta dan pemerintah juga harus saling memberikan keuntungan, seperti sebagai media promosi kami”.

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh staff pihak swasta dari Bank Jatim seperti kutipan berikut:

“ iya mbak kami juga ikut peran namun tidak untuk membangun hanya sekedar memfasilitasi RTH ini dengan memberikan pot bunga seperti yang ada di rth pinggiran jalan juga bak sampah”.

Proses pengembangan RTH yang dilakukan di Kota Blitar melibatkan peran swasta yang hanya ikut memfasilitasi sarana untuk RTH tidak ikut membangun yaitu melibatkan dari Bank Jatim dan Telkom.

Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mencukupi apabila mengelola dan mengembangkan seluruh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Blitar. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Blitar hanya memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

Partisipasi swasta sangat diperlukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara memberikan ide, saran dan kritik kepada pemerintah. Saran yang biasa disampaikan oleh masyarakat melalui layanan “Telepon Hendi” yang merupakan

layanan pengaduan milik Pemerintah Daerah Kota Blitar. Masyarakat sering memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau di kawasan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga memberikan informasi terkait ranting pohon-pohon besar di pinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera di potong. Tentunya informasi dari masyarakat ini sangat membantu pemerintah dalam bertindak, mengingat pemerintah tidak bisa setiap saat mengontrol seluruh ruang terbuka hijau yang ada.

Kota merupakan kawasan utama yang menjadi destinasi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Setiap tahunnya, masyarakat pedesaan berbondong-bondong untuk hijrah ke kawasan perkotaan. Kota dinilai sangat menjanjikan bagi masyarakat terutama dalam mendukung sektor perekonomian. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penduduk perkotaan membuat kawasan perkotaan semakin ramai dan sempit. Akibatnya, kebutuhan akan lahan bangunan juga semakin besar. Permintaan akan lahan perkotaan semakin meningkat terutama dalam rangka pembangunan seperti; pembangunan perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran, pusat industri dan teknologi, serta pembangunan dalam bidang transportasi. Pembangunan yang dilakukan sering kali

bersifat merusak dan mengubah keasrian lahan perkotaan serta lahan terbuka lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap kurang menguntungkan bagi segelintir orang karena dianggap tidak bernilai ekonomis.

Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang mempunyai peran sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka privat sebanyak 10% dari luas wilayah kota. Dari Undang-undang tergambar jelas pentingnya ketersediaan ruang terbuka Hijau (RTH) khususnya di Kota Blitar. Namun sampai saat sekarang ini pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar belum mencapai target yang ditentukan. Faktor penyebabnya adalah pemerintah kekurangan anggaran dan sumberdaya manusia dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Oleh

karena itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat terkait pengembangan ruang terbuka hijau.

Kerjasama antara pemerintah kota Blitar dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengembangan RTH saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan. Kota Blitar perlu menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memerlukan bantuan berupa tambahan investasi dari pihak swasta dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini mengingat adanya keterbatasan yang dimilikinya baik keterbatasan anggaran .

Hal tersebut berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sapto Triyono selaku Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut:

“dalam pengembangan RTH kita tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya pemerintah bisa saja, tapi akan sangat sulit dan membutuhkan anggaran yang cukup besar mbak. Makanya pemerintah melakukan kerja sama dengan banyak pihak seperti Bank Jatim, Bank perkreditan, kadang juga sama koperasi swasta.”

Pernyataan diatas didukung pula oleh Ibu Umi Nadhiroh selaku staff DLH kota Blitar.

“pengembangan RTH di Kota Blitar kita lakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mbak. Kalau tidak seperti itu kita akan kesulitan karna membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jadi kita mengajukan kerjasama dengan pihak swasta seperti bank Jatim, Bank daerah, sama

perusahaan-perusahaan besar juga seperti provider telepon selular. Oh ya, kadang juga sama koperasi daerah. Banyak lah pokoknya mbak. Yang sekiranya bisa membantu kita dalam mengembangkan RTH Kota Blitar.”

Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mencukupi apabila mengelola dan mengembangkan seluruh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Blitar. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Blitar hanya memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

Kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh pihak masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Swasta dalam membantu pemerintah dalam penyediaan lahan dan anggaran dalam pengembangan ruang terbuka .

Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Ada berbagai jenis kemitraan yang biasa terjalin. Di Kota Blitar sendiri kegiatan kemitraan antar instansi biasanya berjalan secara otomatis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi. Bentuk kemitraan yang terjadi dengan pihak swasta berupa BOT (*Build, Operate, Transfer*). Maksudnya pihak swasta atau pengusaha membangun ruang terbuka hijau di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan pada akhirnya akan dikelola oleh pemerintah. Salah satu contoh kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yaitu kerjasama dengan pihak telkomsel. Telkomsel memberikan bantuan fasilitas taman kota berupa penyediaan wifi gratis bagi masyarakat penikmat taman kota.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Umi Nadhiroh selaku staff DLH kota Blitar sebagai berikut:

“kerjasama yang kita lakukan sama pihak swasta macem-macam mbak. Misal kemarin kita kerjasama sama bank jatim. Bentuk kerjasama nya mereka memberi tong sampah yang kita pasang di lokasi Taman Kota Kebonrojo. Terus dari indosat mereka ngasih pot bunga yang kita pasang di beberapa ruas jalan di Kota Blitar, di Pot nya dikasih tulisan indosat gitu.”

Pelaksanaan kemitraan tentunya memiliki manfaat yang sangat banyak baik bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut beberapa manfaat dari kemitraan antara lain: 1) Bagi Pemerintah a. Meringankan beban pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan 20% ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat dari luas wilayah b. Mempermudah pekerjaan pemerintah dalam memperoleh lokasi pengembangan ruang terbuka hijau c. Menghemat waktu, tenaga, dan anggaran 2) Bagi Swasta a. Ajang mempromosikan perusahaan b. Menambah keindahan kantor atau perusahaan c. Menciptakan nama baik perusahaan atau kantor.

b) Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang sifatnya kontekstual, tergantung pada tingkat dan proses kegiatan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Pelibatan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang setidaknya memperhatikan hal berikut:

- a. Masyarakat yang terlibat dan dilibatkan harus mewakili semua kelompok kepentingan dengan komposisi yang proporsional termasuk juga kepentingan kelompok yang terpinggirkan;
- b. Penentuan masyarakat yang terlibat dan dilibatkan dilakukan secara acak dengan melakukan analisis

stakeholder berdasarkan kriteria sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, berupa:

1. Masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau penetapan rencana tata ruang.
2. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Dalam perencanaan tata ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan mengenai beberapa aspek dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Masukan dari masyarakat dalam perencanaan tata ruang adalah mengenai aspek-aspek sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan

wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 dapat berupa:

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota dapat berbentuk:

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat dalam pengelolaan RTH diantaranya:

1. Menjaga keberadaan RTH dengan cara:
 - a. Tidak membangun pada jalur sempadan sungai;
 - b. Tidak mengubah fungsi taman yang ada; dan
 - c. Tidak menebang pohon pada jalur hijau sempadan jalan.
2. Memelihara RTH pada Kawasan Perumahan;

3. Turut mengawasi proses pemeliharaan dan keberadaan RTH dengan memberi masukan kepada instansi pengelola jika terjadi penyimpangan penggunaan RTH;
4. Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan; dan
6. Memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dapat berupa:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sedangkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Upaya pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) dan Paguyuban kelompok pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik komunal. Proses kelembagaan KPL dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) IPAL Komunal telah dilegalisasi dengan adanya Perwali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelompok Peduli Lingkungan dibentuk di tiap Kelurahan se Kota Blitar sebagai mediator antara Badan lingkungan Hidup dan Kelurahan dalam hal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Paguyuban kelompok pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik komunal merupakan wahana tukar informasi dan berbagi pengalaman antar kelompok pengelola IPAL domestik komunal serta media komunikasi antara kelompok pengelola IPAL Domestik Komunal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Hal lain yang dilakukan untuk peningkatan peran serta masyarakat adalah dengan pembinaan kelompok pemanfaatan bio gas dari kotoran sapi.

c) Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar. Peran Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- 1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam masalah ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga kesehatan yang merugikan makhluk hidup. Adanya kebijakan ini dikarenakan minimnya proporsi ruang terbuka hijau yang ada di kota Blitar dimana tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengenai pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilakukan pihak pengelola khususnya DLH yang memiliki peran paling penting dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau, maka dinas pengelola khusus ruang terbuka hijau melakukan tugasnya tidak hanya pembangunan ruang terbuka hijau melainkan juga pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada yaitu dengan penanaman pohon di

taman-taman yang ada di Kota Blitar, di pinggir-pinggir jalan dengan tanaman yang mudah tumbuh berkembang dengan cepat. Selain itu pihak DLH juga melakukan usaha peremajaan pohon dengan pohon-pohon baru yang memiliki akar pohon yang lebih kuat dan daunnya lebih rindang. Perawatan rutin pemeliharaan ruang terbuka hijau juga dilakukan pihak pengelola untuk ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Blitar dalam mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau adalah telah dijelaskan oleh bapak Sundusin selaku Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar”

“Untuk peningkatan RTH di Kota Blitar, salah satunya dengan menambah populasi tanaman. Kegiatan itu juga karena ada dorongan sebagai kota Adipura. Dari adanya *reward* itu, sebagai penyemangat untuk menata RTH, memelihara, dan terus menambah populasi tanaman di Ruang terbuka Hijau. Dari itu, berdampak pula pada estetika kota jadi baik. Adapun hal ini kami bekerja sama dengan berbagi macam instansi pemerintahan yang lain seperti dinas PU , Dinas Pertanian dan yang lainnya”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa menambah populasi tanaman menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi RTH di kota Blitar. Menambah populasi tanaman menjadi upaya yang sangat memungkinkan guna meningkatkan Ruang Terbuka Hijau bagi suatu kota, karena dengan menambah populasi tanaman yang

ada tentunya akan membuat sebuah kota menjadi lebih terasa nyaman dan indah, sehingga ekosistem lingkungan dapat lebih seimbang sebagaimana tujuan dari adanya RTH itu sendiri.

Menambah populasi tanaman dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari meningkatkan tanaman di halaman tempat tinggal, kantor, sampai taman-taman di pemukiman warga. Guna memaksimalkan terlaksananya kegiatan ini, pemerintah dapat membantu dengan pengadaan bibit-bibit tanaman, sehingga masyarakat akan lebih antusias karena ada campur tangan pemerintah yang peduli terhadap lingkungannya.

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Bapak Moh. Khusnur Rofieq selaku Kepala Bidang Pertamanan DLH Kota Blitar bahwa:

“Kalau RTH kita memberikan bantuan bibit tanaman beserta pot bunga. Misalnya kita memberikan bantuan di kawasan pemukiman, contohnya di pemukiman yang ada di Jalan Melati. Di kawasan sana kita mendorong masyarakat untuk menanam tanaman. Jadi ini bukan taman pribadi ya, ini taman publik yang ada di daerah pemukiman. Selain bantuan-bantuan di kawasan pemukiman. Selain memberikan bantuan ke wilayah-wilayah tersebut, kita juga melakukan penanaman pohon pelindung di pinggir jalan umum dan di jalur hijau.”

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kota Blitar dalam hal meningkatkan kualitas dan mempertahankan fungsi Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah dengan cara memberikan bantuan tanaman di daerah pemukiman. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penanaman bibit pohon

lindung di pinggir jalan umum dan jalur hijau agar kualitas udara tetap terjaga.

Setelah dilakukan penanaman, pemerintah Kota Blitar juga melakukan pemeliharaan dan pengawasan, yakni dengan penyiraman tanaman secara rutin. Pemeliharaan tanaman merupakan proses menciptakan, menjaga, dan memulihkan kestabilan kondisi tanaman dari stabilitas cuaca, iklim, penyakit tanaman (hama), dan kebutuhan tanaman akan zat-zat hara, kebutuhan air dengan tujuan supaya setiap tanaman yang ada dalam pengawasan kondisinya baik sesuai dengan harapan.

2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

Adanya keterbatasan luas lahan dipusat kota Blitar mengakibatkan optimalisasi fungsi lahan sebagai lahan terbangun sehingga cenderung mengakibatkan pembangunan ruang terbuka hijau kurang optimal. Disamping itu terjadi pula perubahan fungsi yang semula berupa lahan terbuka akan menjadi bangunan, terutama di daerah perbukitan yang ada disekitar pusat kota Blitar. Pengalihan fungsi ruang terbuka hijau menjadi permukiman ataupun gedung-gedung yang menjadi tugas dari Dinas PU dan Tata Ruang yaitu dengan memberikan izin atas bangunan yang akan didirikan terkadang menjadi konflik juga bagi DLH sebagai pengelola ketersediaan ruang terbuka hijau karena dengan adanya pembangunan biasanya mengurangi ruang terbuka hijau yang telah

ada. Semua akibat kurangnya kerjasama antar pihak pengelola. Sedangkan pihak Dinas PU dan Tata Ruang sebagai pihak yang memberikan izin bangunan hanya bertugas memberikan izin saja namun tidak dapat disalahkan oleh pihak manapun. Dalam hal ini semuanya tentu kembali kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi pembebasan lahan yang dimiliki warga.

Adanya intervensi dari swasta juga menyebabkan perubahan fungsi lahan. Karena pada dasarnya pihak swasta lebih mementingkan keperluan bisnis untuk mendapatkan hasil. Dan itu sudah jelas dapat mengurangi ruang terbuka hijau yang ada di kota Blitar.

Terkait mengenai fungsi ruang terbuka hijau yang dimana banyak disalah fungsikan oleh masyarakat yaitu banyaknya masyarakat Kota Blitar yang berkunjung ke taman-taman yang seharusnya dijaga kebersihannya dan fungsinya namun masyarakat tidak memperhatikan tindakan yang telah dilakukannya dapat merusak taman contohnya banyak masyarakat yang berkunjung ke taman dengan berjalan direrumputan dalam taman sehingga dapat merusak keindahan rumput-rumput yang ada di taman. Selain itu ada juga para pedagang kaki lima yang berdagang di dalam taman sehingga merusak keindahan taman karena masyarakat yang berkunjung ke taman membuang sampah makanan baik sampah organik maupun anorganik sembarangan

sehingga udara di taman tidak sehat yang disebabkan sampah-sampah tersebut.

Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan hanya dalam bentuk himbauan saja mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusak, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Namun, selain itu pengawasan yang dilakukan pula kedepannya dengan membangun plang – plang dilarang mendirikan bangunan di kawasan ruang terbuka hijau, dilarang merusak tanaman di kawasan taman ruang terbuka hijau. Dampak lingkungan yang diterima dari adanya Ruang Terbuka Hijau ini ialah tentu sangat positif yaitu sebagai tempat berkumpul keluarga, rekreasi, refreshing, edukasi dan lain sebagainya. Kawasan tersebut pula akan menjadi *landmark* dari kelurahan tersebut bahkan daerah kota Blitar.

Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam bentuk penghimbauan mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusaki, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Moh. Khusnur Rofieq selaku Kepala Bidang Pertamanan yang menyatakan bahwa:

“untuk mengawasi RTH kita melakukan himbauan kepada masyarakat secara rutin, agar RTH dapat terjaga sebagaimana

fungsinya. Khususnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk yang sering memanfaatkan taman-taman lingkungan untuk kegiatan seperti kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Padahal lahan tersebut termasuk dalam RTH. Harusnya dapat izin terlebih dulu dari pemerintah. Jadi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga Untuk pengawasan yang utama dari sini itu penyiraman, tanaman yang paling utama kan siraman, kalau musim hujan kan tidak apa-apa, kalau kemarau gini ya harus melakukan penyiraman”

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan dan penertiban secara periodik di lokasi taman atau ruang terbuka hijau harus dilakukan secara berkala kepada masyarakat sekitar dan menetapkan sanksi sesuai Perda yang berlaku jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi diberikan guna membantu untuk menghindari adanya lokasi-lokasi taman yang dipergunakan untuk kegiatan non taman tanpa seijin instansi terkait, umumnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk. Bentuk pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat sekitar permukiman dalam mengubah fungsi RTH disekitarnya adalah dengan dibangunnya kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Pengawasan utama yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat adalah dengan melakukan

penyiraman pada tanaman di RTH. Penyiraman dilakukan ketika bukan musim hujan, karena jika musim hujan tanpa melakukan penyiraman pun tidak dipermasalahkan karena secara otomatis, tanaman akan selalu segar karena terkena oleh air hujan. Namun jika masuk pada musim kemarau, tanaman tidak akan segar tanpa dilakukan penyiraman.

- 3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;

Pembangunan wilayah perkotaan perlu memasukkan unsur lingkungan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai suatu strategi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam dan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam yang ada guna mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat sebatas kemampuan dan daya tampungnya dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari penataan ruang kota perlu ditetapkan keberadaannya secara serius, direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat dengan peraturan yang tegas untuk memperjelas status hukumnya. Dengan demikian

pengembangan dan pengelolannya lebih terarah serta dapat menghindari perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi fungsi lainnya, dan mengupayakan terciptanya Kota Hijau sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan menegaskan bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Di dalam peraturan tersebut

diatur mengenai penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta prosedur perencanaan dan peran serta masyarakatnya.

Daerah perkotaan menjadi salah satu faktor tingginya tekanan kehidupan yang cukup besar di pusat kota. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka publik di pusat kota, terutama ruang terbuka hijau di perkotaan sangat diperlukan karena fungsi dan peranannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan rekreasi serta menjadi alternatif tempat istirahat untuk mencari udara segar di tengah kesibukan kegiatan di pusat kota yang begitu padat dan menghilangkan kepenatan setelah bekerja keras dengan biaya yang sangat murah. Adanya ruang terbuka hijau kota menjadi salah satu penyelesaian dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, dimana dampak yang paling mudah kita rasakan.

Kota Blitar adalah salah satu kawasan atau daerah yang melakukan penambahan RTH saat ini. Hal tersebut berdasarkan dengan berita online yang menjelaskan bahwa Pemkot Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berencana menjadikan sejumlah tempat jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) salah satunya yang masuk pada tahap perencanaan pengembangan adalah taman Taman Pecut dan Taman di Tanjungsari.

Selain dua taman diatas, perencanaan pembangunan RTH juga yang dilakukan oleh Pemkot Blitar yaitu dengan dibangunnya hutan kota yang di daerah Pakunden dan Bendo. Pembangunan tersebut akan dilakukan bertahap hingga tahun tahun 2018 ini. Tema bangunan dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam bagi warga Kota Blitar dengan berisikan sejumlah wahana main bersifat alam dan taman bacaan untuk pengunjung. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar tahun 2018 kembali menganggarkan pembangunan untuk Hutan Kota Blitar sebesar Rp 2 miliar. Pembangunan hutan Kota ini adalah pembangunan tahap kedua setelah pada tahun 2017 selesai tepat waktu dan sudah bisa dinikmati masyarakat.

Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaanya. Prosedur dalam pembangunan RTH Blitar juga dijelaskan oleh Ibu Endang Kurnia selaku Kepala Bidang Pertamanan DLH Kota Blitar yang menjelaskan sebagai berikut:

“Proses dalam menambah lahan baru. Proses yang pertama pembuatan Pra desain, Pra desain dapat berupa gambar 3D, foto udara, layout. setelah itu muncul DED (*detail engering desain*) atau perencana, dan pembangunan fisik setah itu saat pembangunan fisik ada 3 unsur konsultan perencana, ada unsur konsultan pengawas, dan konsultan pelaksana atau kontraktor ini berdasarkan Kepres .”

Pernyataan tersebut jelas memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Guna memenuhi keseimbangan ekosistem lingkungan alam dan buatan, pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melakukan penambahan lahan yang akan digunakan untuk Ruang terbuka Hijau. Penambahan lahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara di atas melalui beberapa tahap perencanaan. Dalam tahap pre desain, pemerintah terlebih dulu menyiapkan gambar 3D, foto udara, dan layout sebagai gambaran dalam pembangunan RTH. Tahap selanjutnya yaitu *detail engnering desain* dengan menyelesaikan desain yang sudah dipilih dalam tahap sebelumnya. Selanjutnya pada tahap pembangunan, pemerintah juga menyiapkan konsultan baik dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan.

Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaanya. Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sundusin selaku Kepala Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar yang menyatakan sebagai berikut”

“Pelaksana pembangunan taman yang baru harus dilakukan sesuai dengan prosedur itu seperti 2017 di Taman Sentul, atau Taman Kebon Rojo dan kalau renovasi juga sama karena harus dirobohkan dan dimulai dari nol. Dan sumber referensi

yang melakukan ahli semuanya pra desain dilakukan arsitek, teknik sipil diserahkan ketenaga ahli setelah itu dituangkan didalam perencanaan anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Blitar melakukan penambahan lahan RTH yang cukup tinggi dimulai dari bangunannya taman Tanjungsari dan Taman Pecut yang kini juga dilanjutkan dengan pembangunan Taman Sentul yang mencapai luas 0,9 Hektar yang digunakan sebagai fasilitas umum warga Blitar dengan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk publik.

Penambahan lahan RTH yang dilakukan oleh DLH dan Pemkot Blitar selain mengikuti peraturan perundang-undangan juga dilakukan karena banyaknya RTH yang ada akan memberikan manfaat untuk warga Blitar sendiri misalnya dalam hal ini Taman Pecut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan.

RTH pada umumnya didominasi tanaman dan tumbuhan yang banyak berpengaruh pada kualitas udara kota. Tanaman dapat menciptakan iklim mikro, yaitu penurunan suhu sekitar, kelembaban yang cukup, kadar oksigen yang bertambah karena adanya proses asimilasi dan evapotranspirasi dari tanaman. Tanaman juga menyerap (mengurangi) karbondioksida di udara

hasil kegiatan industri, kendaraan bermotor, dsb. RTH dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk konsumsi 1500 orang per hari. Kota yang baik seyogyanya membuat warga kota sehat dengan kenyamanan dan kualitas lingkungan yang dimilikinya. Hal itu juga dirasakan oleh warga atau masyarakat yang berada didaerah Taman Pecut yang telah merasakan manfaat adanya RTH dan menginginkan pembangunan RTH kota Blitar dilakukan sebanyak mungkin.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suparno masyarakat disekitar Taman Pecut yang mengatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah lo mbak, semenjak dibangunnya Taman Pecut ini udara gak panas, terus tempat main anak ada sambil refresing keluarga dan katanya tahun ini (2018) sarana dan prasarana akan dilengkapi kayak alat-alat bermain dan sebagainya pokok dukung pol kalau bangun kawasan yang enak kayak gini”

Wawancara di atas menjelaskan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penambahan lahan untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar. Penambahan lahan yang dilakukan diantaranya dengan membangun Taman Pecut. Keberadaan Taman Pecut disinyalir dapat membantu dalam proses penurunan suhu lingkungan yang awalnya kota Blitar cenderung panas. Setelah dibangun Taman Pecut sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau lingkungan di sekitar lokasi dapat lebih asri dan nyaman. Masyarakat juga dapat

menikmati lingkungan dengan menghabiskan waktu bersama keluarga karena fasilitas yang disediakan.



Gambar 4.2 RTH Taman Pecut

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Manfaat yang dapat dirasakan dari adanya penambahan lahan untuk Ruang terbuka Hijau dapat menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola RTH. Apalagi banyak masyarakat yang menilai positif adanya penambahan lahan untuk RTH, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mencapai keseimbangan kota. Hal tersebut dikarenakan, setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai keinginan sama untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan tenang, sehingga tempat tinggal mampu menjadi obat untuk menghilangkan segala kepenatan yang berasal dari luar lingkungan.

Hasil penelitian diatas juga didukung dengan pernyataan dari bapak Suyoko salah satu pengunjung Taman Pecut yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ada wacana nambah lahan lagi mbak buat kawasan hijau seperti taman dan hutan kota saya dukung banget ya, soalnya enak buat ngilangin sumpek apalagi kan Blitar juga panas banget. Ya kalau bisa lahan-lahan yang nganggur itu buat RTH saja biar asri kotanya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Blitar sangat mendukung kinerja pemerintah kota Blitar melalui DLH terkait dengan penambahan lahan yang digunakan untuk pembangunan RTH karena warga Blitar menyadari bahwa RTH memiliki manfaat yang banyak dan fasilitas hiburan bagi warga Blitar.

- 4) mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan

masalah dan membahas keputusan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Komunikasi Lingkungan yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, karena masyarakat selain sebagai pelaku dalam pembangunan juga bertindak sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat yang melakukan pembangunan pula yang merasakan. Jadi, tanpa adanya peran masyarakat dalam pembangunan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dibutuhkan yang nantinya dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pembangunan itu sendiri.”

Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/ aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat dapat dipandang (sebagai suatu upaya) untuk membantu Negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna. Peran serta masyarakat ini mensyaratkan pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna. Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan bapak Suharto yang menyatakan sebagai berikut:

“peran masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lahan pertanian yang akan dialihfungsikan memang harus dilibatkan karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga kontribusi masyarakat sangat diperlukan sehingga lahan yang dibebaskan untuk digunakan RTH tidak mengganggu haknya masyarakat”

Penaatan ruang pada dasarnya mengatur kegiatan masyarakat dalam ruang. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari penataan ruang, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya.

c. Inovasi Pemerintah Kota Blitar dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota Blitar membuktikan kepeduliannya akan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan ikut menandatangani Piagam Komitmen Kota Hijau yang difasilitasi Direktur Jenderal (Dirjen)

Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bersama 60 kabupaten/kota se Indonesia akhir tahun lalu. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya yang bertujuan untuk menstimulasi terwujudnya kota yang ramah lingkungan, mampu memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan mineral, mengurangi limbah, menerapkan transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kondisi Kota Blitar yang relatif aman dan nyaman untuk tempat tinggal tentunya menarik banyak orang untuk tinggal didalamnya. Berdasarkan kondisi tersebut Kota Blitar juga rentan terkena dampak dari perkembangan kota yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Adanya alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk, ancaman matinya mata air sebagai akibat penggunaan air tanah yang tidak seimbang akan menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya. Oleh karena itu keikutsertaan Kota Blitar dalam program Kota Hijau merupakan langkah yang tepat.

Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Sundusin selaku Kepala Seksi Pertamanan DLH Kota Blitar yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah kota Blitar punya rencana untuk mewujudkan kota Blitar sebagai *green city* untuk mewujudkan itu diperlukan

sebuah kegiatan-kegiatan inovasi untuk pengembangan RTH kalau gak salah ada 8 mungkin syaratnya nah untuk itu kami membentuk kegiatan-kegiatan misalnya dimulai dari design kota yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan sanitasi, dan banyak yang lainnya ipal komunal juga masuk”

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Komunikasi Lingkungan yang menyatakan sebagai berikut:

“iya mba untuk mewujudkan *green city* pemerintah kota Blitar melakukan kegiatan salah satunya adalah pengelolaan lingkungan yang baik limbah-limbah atau sanitasi, kebersihan kota, sampai dengan kemacetan jalan dibuatkan program khusus agar dapat diselesaikan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Blitar melakukan berbagai macam usaha misalnya dengan melakukan pengelolaan lingkungan dengan seperti pengelolaan sanitasi dan limbah, IPAL komunal, dan sebagainya.

Ada delapan persyaratan untuk mewujudkan kota hijau yang tentunya harus dipenuhi oleh Kota Blitar, yaitu :

- a. Pertama adalah perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan (*Green Planning and Design*). Untuk persyaratan pertama ini paling tidak Kota Blitar telah mempunyai Peraturan tentang tata ruang yang dituangkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar yang merupakan pedoman bagi arah pengembangan Kota Blitar secara spasial.

- b. Kedua adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*). Ruang Terbuka Hijau merupakan faktor penting terciptanya Kota Hijau. UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamantkan besaran RTH Kota adalah 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 % RTH privat. Besaran tersebut masih sangat potensial dicapai Kota Blitar.
- c. Ketiga adalah konsumsi energi yang efisien (*Green Energy*). Program penghematan energy masih perlu terus digalakkan di Kota Blitar, termasuk penggunaan energy alternatif seperti biogas yang cukup potensial dikembangkan di Kota Blitar terutama dari peternakan sapi yang jumlahnya relatif besar terutama di daerah pinggiran kota.
- d. Keempat adalah pengelolaan air yang efektif (*Green Water*). Pengelolaan air juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Blitar diantaranya adalah untuk optimalisasi PDAM. Selain itu potensi air permukaan seperti sungai dan mata air juga belum dimanfaatkan secara optimal. Kota Blitar mempunyai potensi yang cukup besar terkait penyediaan air dengan setidaknya ada 26 mata air di Kota ini Strategi green water juga dapat dilakukan dengan konsep kawasan pensirkulasian air (*water circulating complex*) yang

salah satunya adalah daur ulan air hujan menjadi air baku.

Dalam konsep ini tentunya diperlukan kawasan tadah hujan.

- e. Kelima Pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Untuk syarat ini Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan cukup aktif dalam pengembangannya. Dari Tahun ke tahun jumlah Tempat Pengelolaan sampah secara 3R mengalami peningkatan. Pengadaan komposter baik individual dan komunal masih sangat potensial untuk dikembangkan.
- f. Keenam bangunan hemat energi atau bangunan hijau (*Green Building*), Pemenuhan persyaratan yang keenam ini dapat dilakukan dengan adanya pemberian rekomendasi pada saat pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana Dinas Pekerjaan Umum Daerah menjadi garda terdepan pemenuhannya.
- g. Ketujuh penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan. Kondisi transportasi di kota Blitar relatif masih baik dibuktikan dengan kecilnya tingkat kemacetan. Namun dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan tentunya diperlukan perencanaan untuk meminimalisir emisi dari kendaraan tersebut, *Car free day* mungkin masih menjadi konsep yang potensial untuk diterapkan di Kota Blitar, walaupun sekilas hanya bersifat seremonial tetapi dengan

penjadwalan yang rutin tentunya bisa menjadi sarana promosi lingkungan yang efektif.

- h. Kedelapan adalah peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kota Blitar masih sangat potensial untuk digali lebih jauh, karena pola pembangunan di Kota Blitar adalah sistem pembangunan patisipatif.

Dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai *green city* memiliki delapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kota Blitar. Oleh karena itu, sebuah program yang inovatif telah dilakukan upaya dalam mewujudkan kota Blitar sebagai *green city* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah kota Blitar meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program “gerakan menabung air” yang dicanangkan pada tanggal 22 April 2016 oleh wali kota Blitar dengan membangun sumur resapan.



Gambar 4.3 Pembangunan Sumur Resapan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

- 2) Hutan kota Kebonrojo sebagai wahana wisata edukasi yang memiliki koleksi tanaman langka sejumlah 600 jenis dan lebih dari 10 jenis satwa.



Gambar 4.4 Hutan Kota Kebon Rojo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

- 3) Penggunaan solar cell sebagai sumber energi untuk penerangan jalan umum yang merupakan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.



Gambar 4.5 Instalasi Solar cell

Sumber: Dokumentasi Peneliti

- 4) Pemilihan Sampah di tingkat TPS, sehingga mampu mereduksi timbulan sampah yang masuk ke TPA secara signifikan
- 5) Pemanfaatan gas metan dari proses di TPA untuk sumber energi yang juga merupakan upaya mitigasi dampak perubahan iklim
- 6) Adanya regulasi untuk mengatur peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pengelolaan Sampah

Langkah selanjutnya untuk mewujudkan kota Blitar sebagai *green city* telah melakukan langkah-langkah pengelolaan sampah yang sistematis mulai dari hulu sampai hilir. Pengangkutan sampah dari sumber ke TPS menjadi tanggung jawab individu sedangkan dari TPS ke TPA menjadi tanggungjawab badan lingkungan hidup. TPA kota Blitar telah menggunakan sistem *sanitary landfill* sebagai implementasi UU Nomor tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Adapun sumber timbulan sampah di Kota Blitar sebesar 74.25 ton/hari yang terbagi rinciannya sumbernya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Data sumber timbulan sampah Kota Blitar

No.	Sumber Timbulan	Ton/hari
1.	Rumah tangga	61,94
2.	Perkantoran/ instansi	2,21
3.	Pasar tradisional	5,25
4.	Pusat perniagaan	2,1
5.	Fasilitas public	1,7
6.	Kawasan	0,9
7.	Lainnya	0.15
	Total	74,25

Sumber: profil perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota Blitar

Upaya kota Blitar menuju *green city* melalui kegiatan peduli lingkungan juga melibatkan lapisan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) dan Paguyuban kelompok pengelola IPAL domestik komunal. Proses kelembagaan KPL dan KSM IPAL

Komunal telah dilegalisasi dengan adanya Perwali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya Kelompok Peduli Lingkungan yang dibentuk di tiap Kelurahan se Kota Blitar diharapkan dapat berperan sebagai mediator antara Dinas lingkungan Hidup dan Kelurahan dalam hal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Paguyuban kelompok pengelola IPAL domestik komunal merupakan wahana tukar informasi dan berbagi pengalaman antar kelompok pengelola IPAL domestik komunal serta media komunikasi antara kelompok pengelola IPAL Domestik Komunal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Hal lain yang dilakukan untuk peningkatan peran serta masyarakat adalah dengan pembinaan kelompok pemanfaat biogas dari kotoran sapi.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1) Adanya dukungan dari lembaga lain

Pembangunan administrasi publik difokuskan pada pola koordinasi dengan instansi jawatan/dinas dan lembaga lainnya dalam suatu sistem

untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta berkeadilan.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pande Ketut selaku Kepala DLH yang menyatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka hijau, maka DLH harus bekerjasama pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan”.

Pernyataan di atas menjelaskan bagaimana dalam sebuah pembangunan membutuhkan kontribusi berbagai pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan tidak akan tercapai karena keegoisan sendiri yang merasa tidak membutuhkan pihak lain, karena dengan bekerja sama pekerjaan akan terasa lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang saling membantu untuk mencapai tujuan, karena pada dasarnya tidak ada seorangpun ataupun satu lembaga yang mampu melakukan segalanya dengan baik karenanya kurangnya kompetensi yang dimiliki. Misalnya, dalam permasalahan pengelolaan lahan tentunya Dinas Lingkungan Hidup harus bekerjasama dengan pihak swasta. Tanpa kerja sama tersebut, tentu peningkatan Ruang Terbuka Hijau tidak akan tercapai.

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan Bapak Sapto Triyono yang lain yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila DLH bekerjasama dengan lembaga lain dalam menangani pembangunan kawasan hijau RTH di Kota Blitar, maka perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan mengenai kawasan hijau dalam Perda Tata Ruang Hijau akan

berjalan dengan optimal. Sehingga, kerjasama yang baik akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap optimalnya Perda Rencana Tata Ruang”

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsinya seharusnya mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, Bappeda, dan dari kelurahan sehingga Dinas Lingkungan Hidup akan lebih mudah dalam menjalankan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan lembaga-lembaga lain harus bekerjasama dalam mengoptimalkan perencanaan kawasan hijau RTH di kota Blitar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Apabila Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan dukungan dari lembaga lain, maka perencanaan pembangunan di Kota Blitar akan berjalan secara optimal sehingga dapat bertambahnya RTH sesuai dengan target berdasarkan undang-undang.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengelolaam Pembangunan RTH

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah perencanaan dan pembangunan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Suyatno yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pengalihan fungsi lahan untuk keperluan pembangunan fasilitas umum seperti RTH, masyarakat harus menyampaikan pendapatnya melalui LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

apabila hal tersebut bisa mengganggu tingkat produksi di sektor pertanian”

Hasil wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam proses pembangunan adalah hal yang sangat krusial dan esensial. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya memberikan saran terkait lokasi yang lebih baik untuk digunakan sebagai RTH atau kondisi lahan yang baik untuk digunakan. Partisipasi masyarakat dalam hal tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah dalam memutuskan proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan RTH ke depannya, karena masyarakat nantinya juga akan merasakan dampak positif ataupun negatif dengan adanya pembangunan RTH itu sendiri.

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan Bapak Suharto yang menyatakan sebagi berikut:

“peran masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lahan pertanian yang akan dialihfungsikan memang harus dilibatkan karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sekor pertanian sehingga kontribusi masyarakat sangat diperlukan sehingga lahan yang

dibebaskan untuk digunakan RTH tidak mengganggu haknya masyarakat”

Hasil wawancara di atas menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan lahan yang akan dijadikan RTH. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dalam sektor pertanian, sehingga pembangunan RTH juga akan memberikan dampak pada masyarakat karena dalam proses pembangunan RTH tentu membutuhkan lahan yang cukup dan baik.

Kesalahan dalam proses pembangunan tentu akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Begitupun kesesuaian dan ketepatan dalam pembangunan juga akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat dalam memutuskan perencanaan dan pengelolaan dalam pembangunan RTH sangat penting.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber anggota LPMK mengatakan bahwa :

“Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar. Aspirasi masyarakat tersebut akan ditampung dan disampaikan oleh LPMK kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar melalui rapat kerja badan koordinasi tersebut.”

Perencanaan pembangunan khususnya dalam kebijakan pemerintah terkait dengan RTH akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya program-program partisipatif masyarakat memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan bersama yaitu masyarakat luas.

Perencanaan pembangunan RTH dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan RTH yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Blitar dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Paradigma pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilaksanakan oleh Pemkot Blitar saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi

sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya.

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan pernyataan narasumber yang lain yang menyatakan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dapat disampaikan kepada LPMK sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Selanjutnya, LPMK akan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan RTH”.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dalam setiap tahap perencanaan ruang termasuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.

Dengan demikian, peran masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, melainkan harus disertakan juga dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik di pusat

maupun di daerah. Pelibatan peran serta masyarakat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pembahasan rancangan tata ruang tersebut.

Dari penelusuran undang-undang di atas, terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat itu adalah sesuatu yang wajib. Masyarakat sendiri tentu harus mengisinya secara aktif. Selain dari kebutuhan masyarakat sendiri atas ruang hidup, juga karena masyarakat itu sendirilah yang mengetahui apa saja informasi yang terkandung di dalam ruang kelolanya itu. Di beberapa tempat, pengorganisasian kelompok masyarakat dalam penataan ruang terkonsolidasi dalam Pemetaan Partisipatif. Dimana, Pemetaan partisipatif merupakan proses membangun kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat atas ruang kelolanya, pemberdayaan masyarakat, proses transformasi pengetahuan antar generasi, dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui pembuktian penguasaan ruang kelola setempat (tradisional).

Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian

pemerintah lebih cenderung menerapkan proses perencanaan *top down* atau dari pusat dibanding *bottom up* yang mengakomodasi keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prosentase peran serta masyarakat yang pernah menerima sosialisasi perencanaan dari pemerintah hanya mencapai 20 persen, hanya sebagian kecil masyarakat yang pernah dimintai pendapatnya (*public hearing*) sebesar 28 persen. Ketidakjelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Perencanaan akan menjadi efisien bila melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Branch (1970) dalam Hakim, Dkk, 2008 menekankan bahwa pengelolaan harus dievaluasi terus menerus dan fleksibel dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Pada area tertentu memang terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan ruang terbuka hijau tetapi pada area lebih luas keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghadapi kompleksitas pertumbuhan kota.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat membantu optimalnya implementasi Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana tata ruang dan rencana wilayah Kota Blitar.

Partisipasi masyarakat misalnya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Selanjutnya aspirasi tersebut akan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi menentukan arah pembangunan RTH.

b) Faktor Penghambat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya

Kendala dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau, masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik akan tetapi masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka berbentuk lapangan atau bangunan seperti lapangan voli, badminton dan sebagainya sehingga tanaman hijau yang bisa di tanam pada ruang terbuka tersebut lebih sedikit jumlahnya sehingga fungsi utama dari ruang tidak dapat berjalan optimal.

Akan tetapi dengan kurangnya kesadaran sebagian pengunjung untuk menjaga Kebersihan RTH. Banyaknya pengunjung yang datang pada RTH Blitar juga memiliki dampak yang negatif yaitu dengan tidak menjaganya kebersihan bagi sebagian orang yang mengakibatkan area RTH kotor bahkan terdapat rumput yang mati karena di injak. Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung yaitu

warga Blitar sebagai belum memiliki kesadaran dalam menjaga RTH sebagai fasilitas yang dimiliki bersama.

Suatu peraturan akan terlaksana secara optimal apabila semua unsur berfungsi dengan baik sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sapto Triyono yang menyatakan sebagai berikut:

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH untuk kehidupan mereka sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan beberapa tindakan tidak bertanggung jawab misalnya merokok di area RTH, membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak fasilitas yang ada pada area RTH hingga munculnya PKL disekitar area RTH tanpa izin pada pemerintah yang mengawasinya. Selain itu, masyarakat memanfaatkan ruang yang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang”

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam setiap individu manusia berkaitan dengan hukum atau apapun yang seharusnya hukum itu berlaku. Kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum sehingga orang akan cenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial. Lebih lanjut kesadaran hukum ini sangat dibutuhkan oleh negara untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Sehingga tujuan negara dengan menerapkan hukum itu sendiri dapat tercapai.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan mengakibatkan sebuah permasalahan dan ketidakoptimalan dalam penerapan suatu hukum. Hal tersebut juga berdampak pada perlindungan dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau yang berada dikota Blitar. RTH memiliki manfaa yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat khususnya dikota Blitar. Maka dari itu, pemerintah kota Blitar saat ini sedang mengupayakan penambahan RTH yang sesuai dengan standar berdasarkan dengan undang-undang.

Selian penambahan dan pembangunan RTH tanggung jawab yang tak kalah pentingnya adalah menjaga RTH tersebut agat tidak rusak. Dan hal tersebut membutuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah terkait pengawasan dan pemeliharaan RTH yang itu adalah miliki bersama. Kurangnya kesadaran hukum akan masyarakat akan menimbulkan sikap tidak bertanggung jawab salah satunya yaitu merusak fasilitas umum seperti RTH yang pada umumnya dilakukan dengan cara membuag sampah sembarangan, menginjak tanaman, hingga mencoret faslilitas yang ada. Tindakan dari kurangnya kesadaran tersebut akan merugikan banya pihak pertama pemerintah yang tidak dapat mengurus RTH yang lain karena sibuk dengan pengawasan RTH yang telah dibangun tetapi dirusak yang kedua RTH yang dijadikan fasilitas umum untuk warga Kota Blitar tidak nyaman untuk digunakan atau dikunjungi

yang hal itu disebabkan oleh sebagian warga kota Blitar yang tidak taat hukum atau kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum.

Hasil wawancara sebelumnya juga didukung dengan pernyataan Bapak Moh. Khusnur Rofieq yang menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah akan mudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya, para PKL yang berjualan tanpa ijin sehingga terkadang masuk kedalam nginjek tanaman dan sebagainya buat gak enak dilihat, selain itu juga mencoret-coret fasilitas adalah sikap yang buruk soalnya mereka gak sadar hukum mas”

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Kesadaran hukum Masyarakat sangat menentukan optimal atau tidaknya suatu peraturan. Oleh karena itu, Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang atau masyarakat nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Kesadaran hukum memiliki obyek yaitu nilai-nilai yang terkandung didalam hukum artinya bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran hukum maka individu tersebut mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak berdasarkan hukum tersebut. Karena kesadaran hukum tersebut bukan timbul dari pengaruh lingkungan atau yang lain, tetapi lebih dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing individu terhadap hukum tersebut. Apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan, perawatan, dan pengawasan RTH Kota Blitar adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah yaitu mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Akan tetapi,

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemanfaatan RTH sebagai milik bersama.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Identifikasi Aktor Sebagai Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Model *Triple Helix*

a. Kerjasama Antar Aktor dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Perspektif *Triple Helix*

a) Kerjasama Pemerintah Kota Blitar Dengan Lembaga Pendidikan atau Akademisi

Keterlibatan akademisi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan melaksanakan program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan), dengan terciptanya pengetahuan dan kesadaran akan lingkungan hidup perlu didorong dari semua unsur warga sekolah yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, tenaga non kependidikan serta karyawan sekolah yang terlibat dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan serta turut pula bertanggung jawab dalam upaya terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, dirasa akan membiasakan diri terhadap lingkungan

yang asri dan rindang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah.

Adiwiyata adalah salah satu program kementerian lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. *Green school* atau Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan semua warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2009).

Selain pelaksanaan program Adiwiyata, sekolah-sekolah yang terdapat di Kota Blitar mengikuti program-program dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional pada tahun 2016 Kota Blitar. Program-program tersebut meliputi Lomba Lukis Lingkungan yang diikuti oleh peserta tingkat SD sampai SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 200 orang, Lomba Jingle Lingkungan yang diikuti oleh siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 300 orang, Lomba *Fashion Show* Pakaian Daur Ulang yang diikuti oleh peserta tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kota Blitar yang berjumlah 150

orang, dan Lomba Hemat Energi yang diikuti oleh Sekolah Adiwiyata se-Kota Blitar.

Diterapkannya adiwiyata ini, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *green school* yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan sekolah adalah aspek yang penting dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Oleh karena itu kebijakan sekolah perlu mendapat prioritas utama untuk dikembangkan diseluruh tingkatan pendidikan formal mulai dari pendidikan SD dan pendidikan menengah (SMP dan SMA) atau yang sederajat.

b) Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Selain kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara memberikan ide, saran dan kritik

kepada pemerintah. Saran yang biasa disampaikan oleh masyarakat melalui layanan “Telepon Hendi” yang merupakan layanan pengaduan milik Pemerintah Daerah Kota Blitar. Masyarakat sering memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau di kawasan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga memberikan informasi terkait ranting pohon-pohon besar di pinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera dipotong. Tentunya informasi dari masyarakat ini sangat membantu pemerintah dalam bertindak, mengingat pemerintah tidak bisa setiap saat mengontrol seluruh ruang terbuka hijau yang ada.

Adanya kerjasama pemerintah kota Blitar dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan, pembangunan, dan pengembangan tata ruang terbuka hijau karena pada akhirnya hasil pembangunan ruang terbuka hijau adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan menikmati manfaat ruang terbuka hijau berupa manfaat ekonomi, sosial, lingkungan sesuai tata ruang, serta demi tercapainya tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

c) Kerjasama Pemerintah dengan Instansi Pemerintah yang Lain

Selain kerjasama diatas, kerjasama pemerintah dengan instansi pemerintahan yang lain juga sangat penting. Peran Pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan yaitu membuat kebijakan/ peraturan

terkait lingkungan hidup. Untuk menjalankan kewajiban dalam usaha melestarikan lingkungan, perlu adanya dukungan secara hukum, sehingga upaya pelestarian lingkungan hidup dapat diterapkan secara maksimal.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar. Peran Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- 1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Blitar dalam mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau adalah dengan menambah populasi tanaman dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari meningkatkan tanaman di halaman tempat tinggal, kantor, sampai taman-taman di pemukiman warga. Guna memaksimalkan terlaksananya kegiatan ini, pemerintah dapat membantu dengan pengadaan bibit-bibit tanaman, sehingga masyarakat akan lebih antusias karena ada campur tangan pemerintah yang peduli terhadap lingkungannya. Kegiatan ini tentunya akan membangkitkan peran serta masyarakat untuk peduli dengan

lingkungannya. Lebih banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan niscaya akan lebih mudah untuk mencapai suatu tatanan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu pemerintah Kota Blitar juga memberikan bantuan tanaman di perumahan-perumahan dan melakukan penanaman bibit pohon lindung di pinggir jalan umum dan jalur hijau agar kualitas udara tetap terjaga.

2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

Terkait mengenai fungsi ruang terbuka hijau yang banyak disalah fungsikan oleh masyarakat yaitu banyaknya masyarakat kota Blitar yang berkunjung ke taman-taman yang seharusnya dijaga kebersihannya dan fungsinya namun masyarakat tidak memperhatikan tindakan yang telah dilakukannya dapat merusak taman contohnya banyak masyarakat yang berkunjung ke taman dengan memarkirkan sepeda motornya ke dalam taman sehingga merusak keindahan rumput-rumput yang ada di taman. Selain itu ada juga para pedagang kaki lima yang berdagang di dalam taman sehingga merusak keindahan taman karena masyarakat yang berkunjung ke taman membuang sampah makanan baik sampah organik maupun anorganik sembarangan sehingga udara di taman tidak sehat yang disebabkan sampah. Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam bentuk penghimbauan

mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusaki, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. pengawasan dan penertiban secara periodik di lokasi taman atau ruang terbuka hijau harus dilakukan secara berkala kepada masyarakat sekitar dan menetapkan sanksi sesuai Perda yang berlaku jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi diberikan guna membantu untuk menghindari adanya lokasi-lokasi taman yang dipergunakan untuk kegiatan non taman tanpa seijin instansi terkait, umumnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk. Bentuk pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat sekitar permukiman dalam mengubah fungsi RTH disekitarnya adalah dengan dibangunnya kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Pengawasan utama yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat adalah dengan melakukan penyiraman pada tanaman di RTH. Penyiraman dilakukan ketika bukan musim hujan, karena jika musim hujan tanpa melakukan penyiraman pun tidak dimasalahkan karena secara otomatis, tanaman akan

selalu segar karena terkena oleh air hujan. Namun jika masuk pada musim kemarau, tanaman tidak akan segar tanpa dilakukan penyiraman.

- 3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;

Pengembangan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaannya. Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaannya. Manfaat yang dapat dirasakan dari adanya penambahan lahan untuk Ruang terbuka Hijau dapat menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola RTH. Apalagi banyak masyarakat yang menilai positif adanya penambahan lahan untuk RTH, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mencapai keseimbangan kota. Hal tersebut dikarenakan, setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai keinginan sama untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan tenang, sehingga tempat tinggal mampu menjadi

obat untuk menghilangkan segala kepenatan yang berasal dari luar lingkungan.

- 4) mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota;

Pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam hal penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk sadar akan lingkungan serta mengajak pihak swasta untuk saling membangun taman-taman sebagai RTH dan juga salah satu wisata hemat untuk melepas sejenak kepenatan.

b) Peran Aktor Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

a) Peran Pihak Swasta dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sampai saat ini belum terjalin adanya kerjasama atau kemitraan yang baik dan berlanjut antara pemerintah Kota Blitar dengan pihak swasta untuk bekerja sama dalam melakukan pengembangan RTH. Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumberdaya

manusia sehingga menghambat pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mencukupi apabila mengelola dan mengembangkan seluruh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Blitar. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Blitar hanya memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kuwalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

b) Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Upaya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) dan Paguyuban kelompok pengelola IPAL domestik komunal. Proses kelembagaan KPL dan KSM IPAL Komunal telah dilegalisasi dengan adanya Perwali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya Kelompok Peduli Lingkungan yang dibentuk di tiap Kelurahan se Kota Blitar diharapkan dapat berperan sebagai mediator antara Dinas lingkungan Hidup dan Kelurahan dalam hal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Paguyuban kelompok pengelola IPAL domestik komunal merupakan wahana tukar informasi dan

berbagi pengalaman antar kelompok pengelola IPAL domestik komunal serta media komunikasi antara kelompok pengelola IPAL domestik komunal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Hal lain yang dilakukan untuk peningkatan peran serta masyarakat adalah dengan pembinaan kelompok pemanfaat biogas dari kotoran sapi.

Selain itu, peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang yang memiliki sifat kontekstual, tergantung pada tingkat dan proses kegiatan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Dalam perencanaan tata ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan mengenai beberapa aspek dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

c) Peran Serta Pemerintah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Blitar

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar. Peran Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Blitar dalam mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau adalah dengan menambah populasi tanaman dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari meningkatkan tanaman di halaman tempat tinggal, kantor, sampai taman - taman di pemukiman warga. Guna memaksimalkan terlaksananya kegiatan ini, pemerintah dapat membantu dengan pengadaan bibit-bibit tanaman, sehingga masyarakat akan lebih antusias karena ada campur tangan pemerintah yang peduli terhadap lingkungannya. Kegiatan ini tentunya akan membangkitkan peran serta masyarakat untuk peduli dengan lingkungannya. Lebih banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan niscaya akan lebih mudah untuk mencapai suatu tatanan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu pemerintah Kota Blitar juga memberikan bantuan tanaman di perumahan-perumahan dan melakukan penanaman bibit pohon lindung di pinggir jalan umum dan jalur hijau agar kualitas udara tetap terjaga.

- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
Terkait mengenai fungsi ruang terbuka hijau yang banyak disalah fungsikan oleh masyarakat yaitu banyaknya masyarakat Kota Blitar yang berkunjung ke taman-taman yang seharusnya dijaga kebersihannya dan fungsinya namun

masyarakat tidak memperhatikan tindakan yang telah dilakukannya dapat merusak taman contohnya banyak masyarakat yang berkunjung ke taman dengan memarkirkan sepeda motornya ke dalam taman sehingga merusak keindahan rumput-rumput yang ada di taman. Selain itu ada juga para pedagang kaki lima yang berdagang di dalam taman sehingga merusak keindahan taman karena masyarakat yang berkunjung ke taman membuang sampah makanan baik sampah organik maupun anorganik sembarangan sehingga udara di taman tidak sehat yang disebabkan sampah. Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam bentuk penghimbauan mengenai taman-taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusaki, dan dibangun rumah atau perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Pengawasan dan penertiban secara periodik di lokasi taman atau ruang terbuka hijau harus dilakukan secara berkala kepada masyarakat sekitar dan menetapkan sanksi sesuai Perda yang berlaku jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi diberikan guna membantu untuk menghindari adanya lokasi-lokasi taman yang dipergunakan untuk kegiatan non taman tanpa seijin instansi terkait, umumnya yang berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk. Bentuk pelanggaran yang

kemungkinan dilakukan oleh masyarakat sekitar pemukiman dalam mengubah fungsi RTH disekitarnya adalah dengan dibangunnya kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat. Pengawasan utama yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat adalah dengan melakukan penyiraman pada tanaman di RTH. Penyiraman dilakukan ketika bukan musim hujan, karena jika musim hujan tanpa melakukan penyiraman pun tidak dimasalahkan karena secara otomatis, tanaman akan selalu segar karena disiram oleh air hujan. Namun jika masuk pada musim kemarau, tanaman tidak akan segar tanpa dilakukan penyiraman.

- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;

Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaanya. Pembangunan RTH yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar dilaksanakan dengan prosedur

atau perencanaan yang matang dimulai dengan pre desain, menyiapkan *Desain Engineering Detail* (DED), hingga pelaksanaannya. Manfaat yang dapat diarsakan dari adanya penambahan lahan untuk Ruang terbuka Hijau dapat menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola RTH. Apalagi banyak masyarakat yang menilai positif adanya penambahan lahan untuk RTH, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mencapai keseimbangan kota. Hal tersebut dikarenakan, setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai keinginan sama untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan tenang, sehingga tempat tinggal mampu menjadi obat untuk menghilangkan segala kepenatan yang berasal dari luar lingkungan.

- d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam hal penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk sadar akan lingkungan serta mengajak pihak swasta untuk saling membangun taman-taman sebagai RTH dan juga salah satu wisata hemat untuk melepas sejenak kepenatan.

c. Inovasi Pemerintah Kota Blitar dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kondisi Kota Blitar yang relatif aman dan nyaman untuk tempat tinggal tentunya menarik banyak orang untuk tinggal di dalamnya. Berdasarkan kondisi tersebut Kota Blitar juga rentan terkena dampak dari perkembangan kota yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Adanya alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk, ancaman matinya mata air sebagai akibat penggunaan air tanah yang tidak seimbang akan menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya. Oleh karena itu keikutsertaan Kota Blitar dalam program Kota Hijau merupakan langkah yang tepat.

Pemerintah kota Blitar melakukan berbagai macam usaha misalnya dengan melakukan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sanitasi dan limbah, IPAL komunal, dan sebagainya. Dalam pengembangan pengelolaan RTH, pemerintah diharuskan untuk melakukan berbagai inovasi program kerja. Diantara inovasi tersebut adalah program “Gerakan Menabung Air”. Ada tiga upaya untuk menabung air, melalui pembuatan lubang resapan biopori, membuat sumur resapan dan menanam pohon. Agar ketika musim hujan air hujan yang turun tidak langsung mengalir ke sungai, namun bisa ditampung ke dalam tanah melalui biopori, sumur resapan atau akar tanaman. Sehingga ketika musim kemarau tiba, cadangan air di dalam tanah mencukupi. Secara otomatis debit air baik di sumur maupun di sumber-sumber air relatif tetap. Gerakan menabung air

tersebut dilatar belakangi oleh kekeringan yang dialami warga Kota Blitar saat terjadi kemarau panjang.

Selain “Gerakan menabung air” pemerintah Kota Blitar juga memiliki program inovasi berupa pengembangan Hutan Kota Kebon Rojo sebagai wahana wisata edukasi. Upaya pengembangan yang dilakukan berupa peningkatan dan pengembangan aksesibilitas. Bentuknya, adalah peningkatan moda transportasi (angkutan umum) guna memudahkan pencapaian menuju ke Kebon Rojo dengan frekuensi yang rutin dan tepat waktu. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan pula peningkatan dan pengembangan rambu-rambu penunjuk arah dari koridor utama sampai dengan masuk koridor objek wisata. Serta peningkatan papan informasi mengenai kondisi atau profil objek wisata yang ditempatkan pada lokasi-lokasi yang strategis, jelasnya. Kepala DLH Kota Blitar menambahkan, konsep pengembangan lainnya adalah mempertahankan fungsi kawasan hutan kota sebagai taman kota, sebagai sarana rekreasi keluarga dan penelitian. Juga menjaga, mempertahankan dan melestarikan hutan kota sebagai kawasan ruang terbuka hijau (paru-paru Kota Blitar), dengan tetap menjaga tanaman yang telah ada. Berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup pula, penambahan fasilitas utilitas, khususnya penyediaan tong sampah mengingat masih banyak sampah yang dibuang sembarangan, sehingga memberi kesan kotor. Hal ini mengingat fungsi Kebon Rojo yang tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga menjadi objek lingkungan hidup.

Inovasi lain yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar adalah pengelolaan sampah pada TPA yang ada di kecamatan Ngegong. Di TPA ini sampah dapat diubah menjadi barang yang sangat bermanfaat. Timbunan sampah yang merupakan hasil kumpulan dari 3 kecamatan di Kota Blitar ini mempunyai banyak output yang bisa dimanfaatkan warga sekitar. Salah satunya ialah Gas Methan (Bio Gas) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar pengganti elpiji.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Faktor Pendukung dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam sebuah pembangunan membutuhkan kontribusi berbagai pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan tidak akan tercapai karena keegoisan sendiri yang merasa tidak membutuhkan pihak lain, karena dengan bekerja sama pekerjaan akan terasa lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang saling membantu untuk mencapai tujuan, karena pada dasarnya tidak ada seorangpun ataupun satu lembaga yang mampu melakukan segalanya dengan baik karenanya kurangnya kompetensi yang dimiliki. Misalnya, dalam permasalahan pengelolaan lahan tentunya Dinas Lingkungan Hidup harus bekerjasama dengan pihak swasta. Tanpa kerja sama tersebut, tentu peningkatan Ruang Terbuka Hijau tidak akan tercapai.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan Ruang terbuka Hijau di Kota Blitar. Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsinya seharusnya mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti dinas PU, dinas pertanian, Bappeda, dan Kelurahan sehingga Dinas Lingkungan Hidup akan lebih mudah dalam menjalankan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan lembaga-lembaga lain harus bekerjasama dalam mengoptimalkan perencanaan kawasan hijau RTH di kota Blitar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Apabila Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan dukungan dari lembaga lain, maka perencanaan pembangunan di Kota Blitar akan berjalan secara optimal sehingga dapat menambah RTH sesuai dengan target berdasarkan undang-undang.

Selain itu, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah perencanaan dan pembangunan. peran serta masyarakat dalam proses pembangunan adalah hal yang sangat krusial dan esensial. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah.

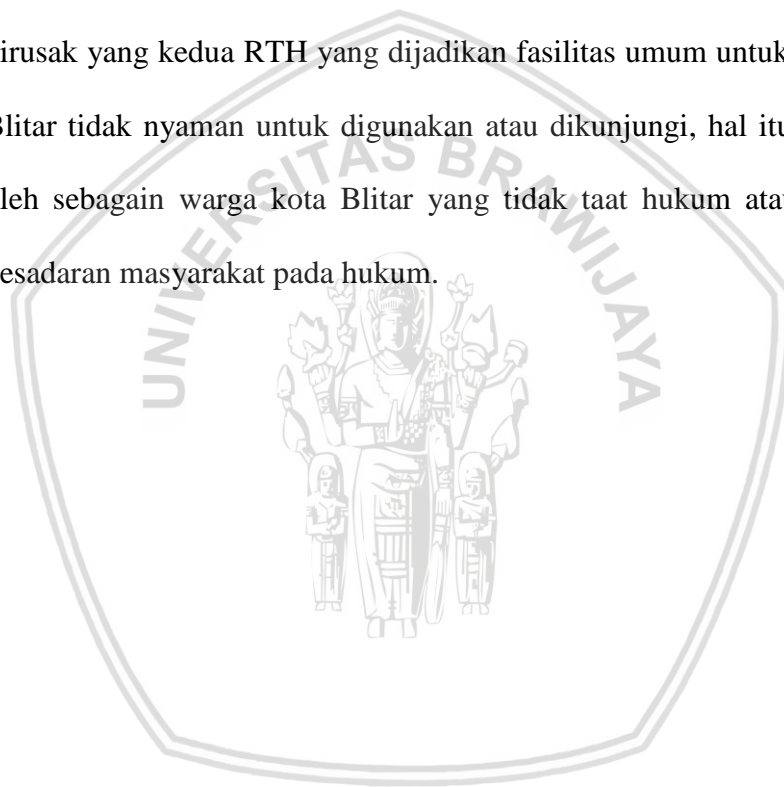
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya memberikan saran terkait lokasi yang lebih baik untuk digunakan sebagai RTH atau kondisi lahan yang baik untuk digunakan. Partisipasi masyarakat dalam hal tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah dalam memutuskan proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan RTH ke depannya, karena masyarakat nantinya juga akan merasakan dampak positif ataupun negatif dengan adanya pembangunan RTH itu sendiri.

b) Faktor Penghambat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kendala dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau. Hal tersebut dibuktikan dengan Banyaknya pengunjung yang datang pada RTH Kota Blitar juga memiliki dampak yang negatif yaitu dengan tidak menjaga kebersihan bagi sebagian orang yang dapat mengakibatkan area RTH kotor bahkan terdapat rumput yang mati karena di injak. Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung yaitu warga Blitar sebagian belum memiliki kesadaran dalam menjaga RTH sebagai fasilitas yang dimiliki bersama.

Selain penambahan dan pembangunan RTH, tanggung jawab yang tak kalah pentingnya adalah menjaga RTH tersebut agar tidak rusak. Dan hal tersebut membutuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah terkait pengawasan dan pemeliharaan RTH yang itu adalah miliki bersama. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat akan

menimbulkan sikap tidak bertanggung jawab salah satunya yaitu merusak fasilitas umum seperti RTH yang pada umumnya dilakukan dengan cara membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman, hingga mencoret fasilitas yang ada. Tindakan dari kurangnya kesadaran tersebut akan merugikan banyak pihak, pertama pemerintah yang tidak dapat mengurus RTH karena sibuk dengan pengawasan RTH yang telah dibangun tetapi dirusak yang kedua RTH yang dijadikan fasilitas umum untuk warga Kota Blitar tidak nyaman untuk digunakan atau dikunjungi, hal itu disebabkan oleh sebagian warga kota Blitar yang tidak taat hukum atau kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Aktor dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Model *Triple Helix*:

- a. Peran Lembaga pendidikan: Keterlibatan akademisi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar diantaranya adalah dengan melaksanakan program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan), dengan terciptanya pengetahuan dan kesadaran akan lingkungan hidup perlu didorong dari semua unsur warga sekolah yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, tenaga non kependidikan serta karyawan sekolah dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan serta turut pula bertanggung jawab dalam upaya terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan Perguruan Tinggi hanya sebatas mensosialisasikan program saja tidak ikut serta dalam pemetaan maupun perencanaan.
- b. Peran Swasta: kerjasama atau kemitraan yang baik dan berlanjut antara pemerintah kota Blitar dengan pihak swasta untuk bekerja sama dalam melakukan pengembangan RTH. Kemitraan dalam

pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Blitar, kerjasama dengan pihak swasta yang dilakukan dengan pihak Telkomsel, dan Bank Jatim.

- c. Peran Pemerintah: sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 yaitu mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada, mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya dan mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
 - d. Peran Masyarakat: pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) dan Paguyuban kelompok pengelola IPAL domestic komunal. Proses kelembagaan KPL dan KSM IPAL Komunal telah dilegalisasi dengan adanya Perwali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor pendukung yang ada saat proses pengelolaan RTH dimana dengan adanya proses ini akan membuat Kota Blitar semakin dinamis dan melalui perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (RTRW)

juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak yang terlibat, dalam hal ini masyarakat juga memberikan peran serta terhadap proses pembangunan. Faktor penghambat dalam hal ini masih ada beberapa kurangnya dari kesadaran masyarakat dalam penggunaan fasilitas yang ada di taman dan masih ada beberapa yang melakukan pengrusakan, selain itu juga masalah dalam pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, juga pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan pengrusakan sarana prasarana di RTH.

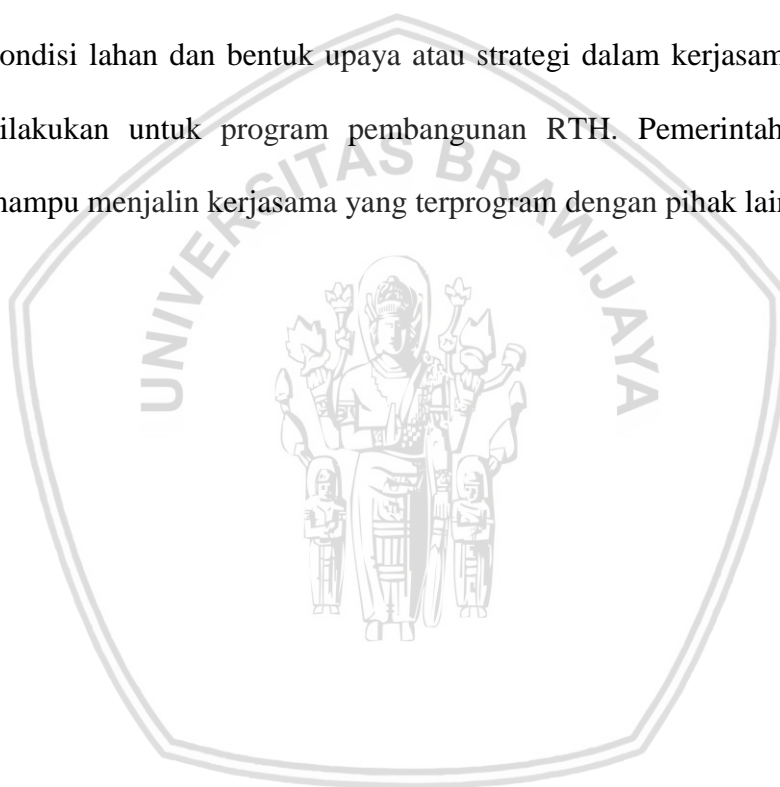
B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Dengan melihat program – program pemerintah daerah, terkait pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan lembaga pendidikan atau akademisi, perlu adanya kerjasama yang terprogram sehingga dapat menciptakan kondisi yang baik sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip prinsip dasar *green school* yaitu partisipatif dan berkelanjutan.
2. Keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Blitar hanya

memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau. Maka dibutuhkannya peran dari pihak lain untuk membantu dalam pendanaan.

3. Peran serta pemerintah merupakan peran yang utama dalam proses pembangunan maka upaya yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan kondisi lahan dan bentuk upaya atau strategi dalam kerjasama yang akan dilakukan untuk program pembangunan RTH. Pemerintah juga harus mampu menjalin kerjasama yang terprogram dengan pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aca, Sugandhy. Dan Hakim, Rustam. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : PT. BumiAksara.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwani, Imam. 2007. *Mendefinisi Kebutuhan GIS Untuk Perencanaan Wilayah dan Kota*. *Jurnal PWK, Edisi Khusus / Februari 2008*. Bandung : Teknik Planologi, FTSP – Institut Teknologi Bandung
- Etzkowitz, H., Ranga, M., Benner, M., Guarany, L, Maculan, A. M. and Kneller R. 2008. *Pathways to the Entrepreneurial University: Towards a Global Convergence*. *Science and Public Policy* 35, 1-15.
- Etzkowitz, Henry. 2005. *The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development*. *R&D Management*. Online (<http://onlinelibrary.wiley.com/>), diakses pada 20 Desember 2017
- Etzkowitz, Henry., James Dzisah, Marina Ranga and Chunyan Zhou. 2007. *The triple helix model of innovation: University-industry-government interaction*, *Tech Monitor* Jan-Feb 2007.
- Gallion, Arthur B. dkk. 1994. *Pengantar Perancangan Kota*. Erlangga: Jakarta.
- Hakim, Rustam dan Hardi Utomo. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Prinsip – Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta : Bumi Aksara
- Irianti, Iln. 2010. “*Ruang Terbuka Hijau*”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*. Jurusan Teknik Sipil POLNEP. Edisi Januari. 1-7.
- Jovi Andre Kurniawan dan Retno Suryawati. 2017. Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 1, 2017 hlm 39 - 45
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*. Pidato Pengukuran Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Lusetyowati, T. 2011. Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura. Jurnal Prosiding Seminar Nasional AVOER ke-3.
- Moleong, j, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oscar. A., S. Monterino., & M. Thomshon. 2010. *A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory*, Journal of Business Economics and Management, 13(4), 1-31.
- Pamudji, S., 1985, *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance," Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.
- Schumpeter J. 1994. *The Theory of Economic Developmrt. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Bussiness Cycle*. Havard University.
- Septiono, D. Setiawan. 2016. *Model Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Mendukung Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Studi Kasus KPH Yogyakarta)*. Biro Penerbit Planologi Undip Volume 12 (3): 277-292.
- Sjamsu. 2017 *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017. Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Makassar: Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. III (1):001-110
- Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Sugandhi, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. "Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sumarto, Hetifah SJ. 2003, *Inovasi, Patisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susilo, B., 2006. *Geokomputasi Berbasis Sistem Informasi Geografi dan Cellular Automata untuk Pemodelan Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di*

Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta, Laporan Penelitian. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Syafie, InuKencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja. 1985, *Teori dan Strategi Pengembangan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia.

Warsono, Sony., dkk. 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: CGCG FEB UGM.

Yuliar, Sonny. 2014. *Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Simpul Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata Budaya*. Institut Teknologi Bandung.

Zoer'aini dan Bagas. 2013. *Ruang Tata Hijau*. Jakarta: Cides

Dokumen Landasan Hukum:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun. 2008 tentang Industri dan Usaha Kecil Kota Blitar

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website:

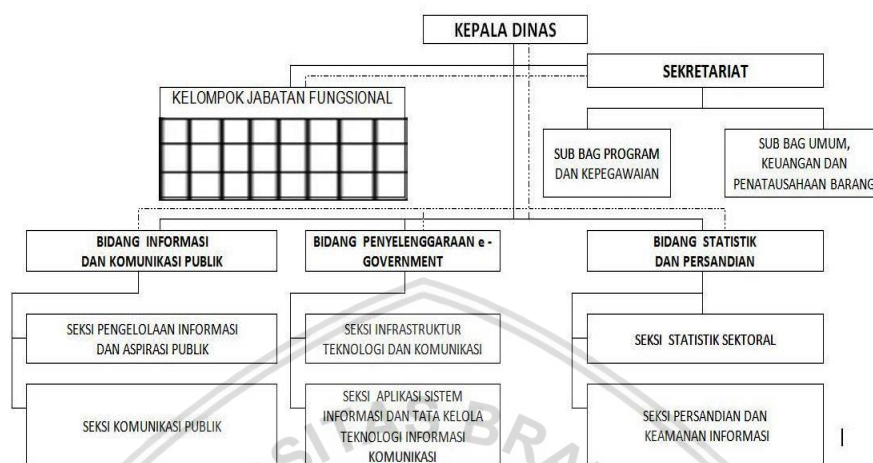
<http://bappeda.jatimprov.go.id>

Kompas.com. 2017. *Dalam 5 Tahun, Indonesia Punya Ruang Terbuka Hijau 249,2 Hektar.* Online, (http://properti.kompas.com/read/2017/07/02/180000921/dalam.5.tahun.in donesia.punya.ruang.terbuka.hijau.249.2.hektar) Diakses pada 20 Desember 2017.

Usahid. 2008. *Mengenal Stakeholder.* <http://hmp-humas-usahid.blogspot.co.id/2008/09/mengenal-stakeholder.html>. Diakses pada 20 Desember 2017



LAMPIRAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLH



Gambar 4.2 RTH Taman Pecut



Gambar 4.3 pembuatan sumur resapan



Gambar 4.4 Hutan Kota Kebon Rojo



Gambar 4.5 Instalasi Solar cell





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007**

TENTANG

PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
 - c. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
 - d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan



Pasal 27

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota**Pasal 28**

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 31 ..

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum**Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : YOANA RAHMA RISTANTI
 Tempa, Tanggal Lahir : Blitar, 24 Juni 1995
 Umur : 22 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat di Malang : Jl. Mt. Haryono No. 139 Malang
 Alamat Asal : Desa Wonorejo RT 1 RW 1-Kec. Talun-
 Kab. Blitar
 NIM : 145030107111041
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Brawijaya
 No. Telp : 081234911246
 Alamat e-mail : yoana.rahma@yahoo.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN Wonorejo 01	2002-2008
2.	SMPN 1 Talun	2008-2011
3.	SMAN 1 Talun	2011-2014
4.	S-1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang	2014-2018

C. Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi/ Jabatan	Tahun
1.	OSIS/ Wakil Ketua	2009